



**PEMERINTAH
KABUPATEN CIREBON**

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2025-2026



**Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Cirebon**

Jl. Sunan Drajat No. 15,
Telepon : (0231) 8330580
<http://diskominfo.cirebonkab.go.id>,
Email : diskominfo@cirebonkab.go.id
Sumber - 45611

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2026 merupakan kebijakan jangka menengah transisi yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2026 dan memperhatikan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra periode sebelumnya serta mandat yang diberikan berdasarkan kewenangan urusan pemerintahan.

Dokumen renstra ini merupakan acuan rencana kerja tahunan agar dapat memberikan kontribusi maksimal terhadap pembangunan Kabupaten Cirebon, terutama pembangunan dalam bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian, melalui penetapan program unggulan dengan mengantisipasi ketersediaan anggaran.

Substansi Renstra dapat dilakukan penyesuaian seperlunya seiring perubahan lingkungan strategis di bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian, baik dari internal maupun eksternal yang mempengaruhi tujuan dan sasaran Renstra.

Demikian Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon Tahun 2025 - 2026 ini disusun untuk dapat dilaksanakan secara akuntabel dan berorientasi pada peningkatan kinerja.

Sumber, Februari 2024

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN CIREBON,

BAMBANG SUDARYANTO, SH., MH.

Pembina Tk. I

NIP. 19781024 200604 1 015

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	I -1
1.1 Latar Belakang	I -1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	I -1
1.3 Maksud dan Tujuan	I -5
1.4 Sistematika Penulisan	I -6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	II -1
2.1 Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon	II -1
2.2 Sumber Daya Dinas Komunikasi dan Informatika	II -4
2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika	II -9
2.4 Kelompok Sasaran Layanan	II -14
2.5 Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Tantangan Pengembangan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika	II -14
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	III -1
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Capaian Kinerja	III -1
3.2 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga	III -2
3.3 Mandat Penyelenggaraan Urusan Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian	III -6
3.4 Prioritas Pembangunan Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024-2025	III -8
3.5 Penetapan Isu Strategis	III -8
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	IV -1
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	V -1
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	VI -1
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	VII -1
BAB VIII PENUTUP	VIII -1

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Golongan	II – 5
Tabel 2.2	Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Pendidikan Formal	II – 5
Tabel 2.3	Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Jenis Kelamin	II – 5
Tabel 2.4	Perbandingan Pegawai Negeri Sipil dengan Tenaga Honorer Dinas Komunikasi dan Informatika	II - 6
Tabel 2.5	Rekapitulasi Aset yang dimiliki Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2023	II - 8
Tabel 2.6	Rekapitulasi Sarana Penyebaran Informasi yang dimiliki Dinas Komunikasi dan Informatika	II - 9
Tabel 2.7	Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika	II - 10
Tabel 2.8	Anggaran dan Realisasi pendanaan Pelayanan Tahun 2020	II - 12
Tabel 2.9	Anggaran dan Realisasi pendanaan Pelayanan Tahun 2021-2023	II - 13
Tabel 3.1	Sasaran Strategis dan Program Kemenkominfo 2020-2024	III – 2
Tabel 3.2	Sandingan Tujuan dan Sasaran Kemenkominfo dengan Renstra Diskominfo Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2026	III – 3
Tabel 3.3	Sasaran Strategis dan Program Kemenkominfo 2020-2024	III – 3
Tabel 3.4	Sandingan Tujuan dan Sasaran Diskominfo Jabar dengan Renstra Diskominfo Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2026	III - 4
Tabel 3.5	Sandingan Tujuan dan Sasaran BPS dengan Renstra Diskominfo Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2026	III - 5
Tabel 3.6	Tujuan dan Sasaran Strategis Badan Siber dan Sandi Negara Tahun 2020-2024	III - 6
Tabel 3.7	Sandingan Tujuan dan Sasaran BSSN dengan Renstra Diskominfo Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2026	III - 6
Tabel 4.1	Keterkaitan Tujuan dan Sasaran rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Cirebon dengan Tujuan dan Sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025-2026	IV - 1
Tabel 4.2	Indikator Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika	IV - 2
Tabel 4.3	Indikator Kinerja Program	IV - 3
Tabel 4.4	Indikator Kinerja Kegiatan	IV - 4
Tabel 4.5	Cascading Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2026	IV - 6
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan	V - 2
Tabel 6.1	Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Dinas Kominfo Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2026	VI - 2
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Tujuan Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025-2026	VII - 1

Tabel 7.2	Indikator Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025-2026	VII - 1
Tabel 7.3	Indikator Kinerja Program Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025-2026	VII - 2
Tabel 7.4	Indikator Kinerja Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025-2026	VII - 2
Tabel 7.5	Indikator Kinerja Kunci Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025-2026	VII - 4
Tabel 7.6	Indikator SDGs Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025-2026	VII - 6
Tabel 7.7	Formulasi Indikator Tujuan Dinas Komunikasi dan Informatika	VII - 7
Tabel 7.8	Formulasi Indikator Sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika	VII - 7
Tabel 7.9	Formulasi Perhitungan Indikator Program Dinas Komunikasi dan Informatika	VII - 8

Lampiran Peraturan Bupati Cirebon

Nomor :

Tanggal :

Tentang : Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon
Tahun 2025-2026

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon Tahun 2025 – 2026 yang selanjutnya disebut Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025 – 2026 merupakan dokumen perencanaan Dinas Komunikasi dan Informatika untuk periode 2 (dua) tahun sebagai penjabaran naskah teknokratik Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025 – 2026 yang akan digunakan Penjabat (Pj) Kepala Daerah sebagai pedoman penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah tahun 2025 -2026.

Penyusunan Renstra dilaksanakan dengan memperhatikan tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tahun 2025 – 2026, serta norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat yang menjadi kewenangan daerah. Selain itu, penyusunan Program/Kegiatan/Subkegiatan dalam Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025 – 2026 memperhatikan pula penyelarasan program prioritas nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 – 2024, evaluasi hasil capaian kinerja tujuan, sasaran dan hasil (*outcome*) Renstra Tahun 2019 – 2024, isu-isu strategis yang terkait dengan bidang urusan dan tugas pokok dan fungsi Dinas, kebijakan nasional, dan regulasi lain yang berlaku.

Dengan disusunnya Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika ini, acuan umum tentang arah pembangunan komunikasi dan informatika, persandian serta statistik tahun 2025 sampai dengan tahun 2026 ditetapkan dan dijabarkan lebih lanjut dalam rencana tahunan.

1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Peraturan perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025 – 2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibu kota Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4843); sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 19 Nomor 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Perpu Nomor 2 Nomor 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5589);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5149);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5322);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
17. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (Lembaran negara Tahun 2014 Nomor 78);
18. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 182);
19. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 112);
20. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
24. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika;
25. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 16 Tahun 2020 tentang Manajemen Data Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
26. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2019 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Penyelenggaraan Statistik Sektoral oleh Pemerintah Daerah;
27. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah;
28. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
29. Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Periode Rencana Pembangunan Jangka menengah Berakhir pada Tahun 2024;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 14 Tahun 2011 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

31. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 132 Tahun 2015 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi;
33. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 41 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Pengaduan Masyarakat melalui Media Komunikasi;
34. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 85 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten Cirebon;
35. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 64 Tahun 2021 tentang Website dan Metadata Aplikasi di Lingkungan Pemerintah daerah Kabupaten Cirebon;
36. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon;
37. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 17 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika;
38. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 56 Tahun 2022 tentang Satu Data Kabupaten Cirebon;
39. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 96 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten Cirebon;
40. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 95 Tahun 2023 tentang Standarisasi Perangkat Jaringan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkup Pemerintah Kabupaten Cirebon
41. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 143 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika
42. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tahun 2025-2026;

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud

Memberikan pedoman/landasan serta arah pembangunan di bidang penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian di Kabupaten Cirebon dalam kurun waktu tahun 2025 – 2026 sebagai penjabaran Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025 – 2026.

b. Tujuan

Tujuan disusunnya Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon Tahun 2025 – 2026 adalah:

1. Menelaah kinerja pembangunan Pemeirntah Daerah Kabupaten Cirebon dalam bidang komunikasi dan informatika, statistik serta persandian yang memberi gambaran kondisi riil daerah;
2. Merumuskan permasalahan pembangunan daerah dan isu-isu strategis pembangunan Kabupaten Cirebon dalam bidang komunikasi dan informatika, statistik serta persandian yang menjadi bahan pertimbangan penentuan tujuan dan sasaran pembangunan bidang komunikasi dan informatika, statistik serta persandian;
3. Merumuskan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Cirebon dalam bidang komunikasi dan informatika, statistik serta persandian untuk 2 (dua)

tahun ke depan;

4. Merumuskan program pembangunan Kabupaten Cirebon dalam bidang komunikasi dan informatika, statistik serta persandian untuk 2 (dua) tahun ke depan;
5. Menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah beserta target indikator tahun 2025 sampai dengan 2026;
6. Memberikan panduan dan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) setiap tahun mulai tahun 2025 sampai dengan 2026.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Mengacu kepada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berakhir pada Tahun 2024, sistematika penulisan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon Tahun 2025 – 2026 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas latar belakang penyusunan dokumen rencana strategis Dinas Komunikasi dan Informatika.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Memuat undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Dinas Komunikasi dan Informatika serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Dinas Komunikasi dan Informatika.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penulisan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Berisi tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan, kelompok sasaran layanan serta tantangan dan peluang Dinas Komunikasi dan Informatika.

BAB III PERMASALAHAN ISU STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Berisi identifikasi permasalahan berdasarkan capaian kinerja pada periode renstra sebelumnya; telaahan dokumen terkait; serta penentuan isu-isu strategis.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Berisi telaahan tujuan dan sasaran jangka menengah Daerah; kewenangan penyelenggaraan urusan; cascading kinerja dari tujuan hingga outcome dan output.

BAB V STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Berisi mengenai pernyataan strategi dan arah kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Renstra.

BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Berisi mengenai rencana program, kegiatan, Sub Kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Berisi indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Komunikasi dan Informatika dalam 2 (dua) tahun mendatang.

BAB VIII PENUTUP

Berisi penjelasan kaidah pelaksanaan kegiatan serta penegasan komitmen Dinas Komunikasi dan Informatika terhadap pelaksanaan Renstra dan Rencana Pembangunan Daerah.

BAB II

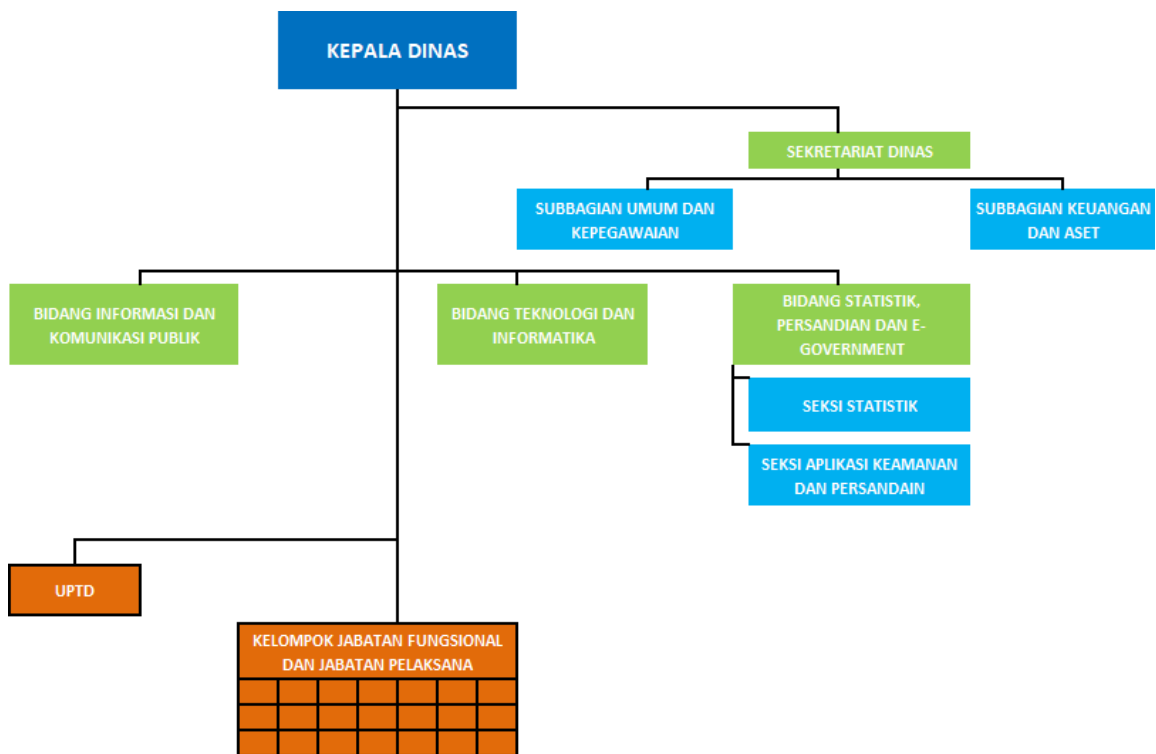
GAMBARAN PELAYANAN

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

2.1 STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN CIREBON

2.1.1. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 143 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika.



Gambar 2.1. Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon

2.1.2. Tugas Pokok dan Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 143 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika, kedudukan Dinas Komunikasi dan Informatika adalah Dinas yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi:

- Perumusan kebijakan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian;
- Pengelolaan informasi dan komunikasi publik;
- Pengelolaan aplikasi informatika;

- d. Pengelolaan statistik sektoral;
- e. Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi;
- f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian;
- g. Pelaksanaan administrasi Dinas Komunikasi dan Informatika; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Berikut ini adalah rincian Tugas Pokok dan Fungsi masing-masing unit kerja pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon :

1. Kepala Dinas

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Kepala Dinas mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidangpersandian;
 - b. pengelolaan informasi dan komunikasi publik;
 - c. pengelolaan aplikasi informatika;
 - d. pengelolaan statistik sektoral;
 - e. penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi;
 - f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian;
 - g. pelaksanaan administrasi Dinas Komunikasi dan Informatika; dan
 - h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat

- (1) Sekretariat Dinas melaksanakan tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Sekretariat mempunyai fungsi:
 - a. koordinasi kegiatan;
 - b. koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran;
 - c. pengumpulan dan pengolahan data serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;
 - d. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hukum, organisasi, hubungan masyarakat, serta kearsipan dan dokumentasi;
 - e. penyelenggaraan pengelolaan barang milik negara dan pelayanan pengadaan barang/jasa; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

3. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik

- (1) Bidang Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai tugas merumuskan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan pengelolaan informasi dan

komunikasi publik serta kehumasan dan kemitraan.

- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok Bidang Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai fungsi:
- a. perumusan bahan perencanaan pada Bidang Informasi dan Komunikasi Publik;
 - b. perumusan kebijakan teknis di bidang informasi dan komunikasi publik;
 - c. pengendalian pelaksanaan monitoring opini dan aspirasi publik serta monitoring informasi dan penetapan agenda prioritas komunikasi pemerintah daerah;
 - d. pengendalian pelayanan informasi publik;
 - e. penguatan tata kelola komisi informasi di daerah;
 - f. pengelolaan konten dan perencanaan media komunikasi publik;
 - g. pengelolaan media komunikasi publik;
 - h. penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik;
 - i. pengendalian manajemen komunikasi krisis;
 - j. penyediaan atau pengadaan sarana dan prasarana pendukung informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah;
 - k. pelaksanaan layanan hubungan media;
 - l. pelaksanaan kemitraan dengan pemangku kepentingan;
 - m. penyelenggaraan hubungan masyarakat, media dan kemitraan komunitas;
 - n. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik; dan
 - o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

4. Bidang Teknologi dan Informatika

- (1) Bidang Teknologi dan Informatika mempunyai tugas merumuskan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan pengelolaan teknologi dan informatika
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Bidang Teknologi dan Informatika mempunyai fungsi :
- a. Perumusan bahan perencanaan pada Bidang Teknologi dan Informatika;
 - b. perumusan kebijakan teknis di bidang teknologi dan informatika;
 - c. pengembangan dan penyelenggaraan *Data Center* (DC) dan *Disaster Recovery Center* (DRC);
 - d. peningkatan kapasitas SDM dalam pengelolaan infrastruktur dan teknologiinformatika;
 - e. pelaksanaan *povernment cloud computing*;
 - f. pengelolaan akses internet pemerintah dan publik;
 - g. pelaksanaan filtering konten negatif (jaringan pemerintah daerah);
 - h. pelayanan interkoneksi jaringan intra pemerintah daerah;
 - i. pelaksanaan penetapan standar format data dan informasi;
 - j. pelaksanaan pengelolaan walidata;
 - k. pelayanan *recovery* data dan informasi;
 - l. pengelolaan data elektronik pemerintahan;
 - m. pelaksanaan penerapan interoperabilitas;
 - n. pelaksanaan interkoneksi layanan publik dan pemerintahan;
 - o. pengembangan pusat *Application Programming Interface* (API) daerah;

- p. pelaksanaan monitoring *traffic* elektronik;
- q. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Bidang Teknologi dan Informatika; dan
- r. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

5. Bidang Statistik, Persandian dan E-Government

- (1) Bidang Statistik, Persandian dan E-Government mempunyai tugas merumuskan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan pengelolaan statistik, persandian dan e-government.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Bidang Statistik, Persandian dan E-Government mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan bahan perencanaan pada Bidang Statistik, Persandian dan E-Government;
 - b. Perumusan kebijakan teknis di bidang statistik, persandian dan e-government;
 - c. penyelenggaraan statistik sektoral;
 - d. pelaksanaan penyelenggaraan layanan teknologi informasi;
 - e. pelayanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi;
 - f. pelaksanaan tata kelola jaminan keamanan informasi menggunakan persandian (aspek kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan atau nir-sangkal), pelaksanaan dukungan kegiatan pengamanan informasi, pelaksanaan penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah;
 - g. pelayanan pelaksanaan audit Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK);
 - h. pelaksanaan penyelenggaraan ekosistem Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) *smart city*;
 - i. pelaksanaan penyelenggaraan *Government Chief Information Officer (GCIO)* pemerintah daerah;
 - j. penyelenggaraan pengembangan sumber daya Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) pemerintah daerah dan masyarakat di daerah;
 - k. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Bidang Statistik, Persandian dan E-Government; dan
 - l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

2.2 Sumber Daya Dinas Komunikasi dan Informatika

Sumber daya Dinas Komunikasi dan Informatika dapat dibedakan menjadi sumber daya manusia, sarana dan prasarana pendukung, serta sarana penyebaran informasi. Penjelasan untuk masing-masing sumber daya tersebut disajikan dalam uraian berikut ini.

2.3.1 Sumber Daya Manusia

Kondisi sumber daya manusia Dinas Komunikasi dan Informatika pada Tahun 2023 sebanyak 24 orang PNS, dengan rincian berdasarkan golongan, tingkat pendidikan formal, dan jenis kelamin disajikan dalam **Gambar 2.2 – Gambar 2.4**.

Tabel 2.1 Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Golongan

No	Uraian	Go IV	Go III	Go II	Go I	Jumlah
1	Kepala Dinas	1				1
2	Sekretariat		4	2		6
3	Bidang Teknologi dan Informasi		4	1		5
4	Bidang Informasi dan Komunikasi Publik		3	1		4
5	Bidang Statistik, Persandian dan E-Government	1	6	1		8
	Jumlah	2	17	5		24

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Diskominfo, 2023

Tabel 2.2 Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Pendidikan Formal

No	Uraian	S1	S2	S3	SMA	Jumlah
1	Kepala Dinas	1				1
2	Sekretariat	1	3		2	6
3	Bidang Teknologi dan Informasi	1	3	1		5
4	Bidang Informasi dan Komunikasi Publik		3	1		4
5	Bidang Statistik, Persandian dan E-Government	2	5	1		8
	Jumlah	5	14	3	2	24

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Diskominfo, 2023

Tabel 2.3 Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Uraian	Laki-laki	Perempuan
1	Kepala Dinas	1	
2	Sekretariat	5	1
3	Bidang Teknologi dan Informasi	4	1
4	Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	2	2
5	Bidang Statistik, Persandian dan E-Government	5	3
	Jumlah	17	7

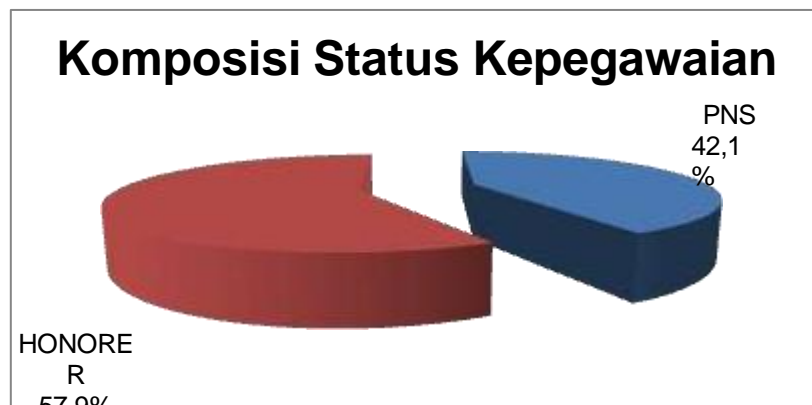
Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Diskominfo, 2023

Disamping itu, terdapat Tenaga Honorer yang berkerja pada Dinas Komunikasi dan Informatika. Berdasarkan data per Desember 2023 bahwa Tenaga Honorer yang ada pada Dinas Komunikasi dan Informatika sebanyak 33 pegawai. Jika dibandingkan dengan jumlah Pegawai Negeri Sipil maka dapat disajikan tabel sebagai berikut :

Tabel 2.4 Perbandingan Pegawai Negeri Sipil dengan Tenaga Honorer Dinas Komunikasi dan Informatika

No	Status Kepegawaian	Jumlah	Prosentase
1	PNS	24	42,1%
2	Tenaga Honorer	33	57,9%
		58	100%

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Diskominfo, 2023



❖ **Kebutuhan Ideal Pegawai**

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon terdiri atas sekretariat dan 3 bidang yaitu Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, Bidang Teknologi dan Informatika dan Bidang Statistik, Persandian dan e-Government. Interpretasi dari tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

➤ **Sekretariat**

Data eksisting pegawai ASN Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon pada unit kerja Sekretariat sebanyak 8 pegawai, sedangkan kebutuhan ideal pegawai yang ada pada sekretariat sebanyak 12 pegawai ASN.

No	Sekretariat	Existing	Ideal
1	Perencana	1	3
2	Kasubbag Keuangan dan Aset	1	1
3	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	1	1
4	Pengadministrasian Umum	2	3
5	Pengolah data perencanaan penganggaran	0	1
6	Penyusun program anggaran dan Pelaporan	0	1
7	Analisis sumber daya aparatur	0	1
8	Arsiparis	0	1
	Jumlah	6	12

➤ **Bidang Informasi dan Komunikasi Publik**

Data eksisting pegawai ASN Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon pada unit kerja Bidang Informasi dan Komunikasi Publik sebanyak 5 pegawai ASN, sedangkan kebutuhan ideal pegawai yang ada pada Bidang Informasi dan Komunikasi Publik sebanyak 9 pegawai ASN.

No	Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Exiting	Ideal
1	Kabid Informasi dan Komunikasi Publik	1	1
2	Kasi informasi publik	1	1
3	Kasi kehumasan dan kemitraan	1	1
4	Kasi komunikasi publik	1	1
5	Analisis humas	0	1
6	Pengadministrasian analisis dan kemitraan media	0	1
7	Penyusun dokumen kesenian dan perfilman	0	1
8	Penata liputan	0	1
9	Pengadministrasian keuangan	1	1
	Jumlah	5	9

➤ **Bidang Teknologi dan Informatika**

Data eksisting pegawai ASN Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon pada unit kerja Bidang Teknologi Informatika sebanyak 4 pegawai ASN, sedangkan kebutuhan ideal pegawai yang ada pada Bidang Teknologi Informatika sebanyak 10 pegawai ASN.

No	Bidang Teknologi dan Informatika	Exiting	Ideal
1	Kabid Teknologi Informatika	1	1
2	Kasi Infrastruktur Teknologi	1	1
3	Kasi Manajemen dan Integrasi Sistem	1	1
4	Pranata teknologi informasi komputer	0	6
5	Pengadministrasian keuangan	1	1
	Jumlah	4	10

➤ **Bidang Statistik, Persandian dan E-Government**

Data eksisting pegawai ASN Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon pada unit kerja Bidang Statistik, Persandian dan E-Government sebanyak 6 pegawai ASN, sedangkan kebutuhan ideal pegawai yang ada pada Bidang Statistik, Persandian dan E-Government sebanyak 10 pegawai ASN.

No	Bidang Statistik, Persandian dan E-Government	Exiting	Ideal
1	Kabid Statistik, Persandian dan E-Government	1	1
2	Kasi statistik	1	1
3	Kasi aplikasi, persandian dan keamanan	1	1
4	Kasi tata kelola e-government	1	1
5	Analisis statistik	0	1
6	Pranata teknologi informasi komputer	0	2
7	Sandiman	0	1
8	Pengadministrasian keuangan	2	2
	Jumlah	6	10

2.3.2 Asset/Modal (Sarana dan Prasarana Pendukung)

Berdasarkan hasil rekonsiliasi Barang Milik Daerah (BMD) per 31 Oktober 2023, aset BMD yang dimiliki Dinas Komunikasi dan Informatika disajikan dalam **Tabel 2.1**. Jumlah aset yang dimiliki tersebut berada dalam berbagai kondisi, termasuk BMD dengan kondisi rusak, namun belum dihapus dari Buku Aset milik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon.

Tabel 2.5 Rekapitulasi Aset yang Dimiliki Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2023

Kode Bidang Barang	Nama Bidang Barang	Volume/ Satuan	Keterangan
1	GOLONGAN TANAH		
	Tanah	3 Bidang	
2	GOLONGAN PERALATAN DAN MESIN		
	Alat-alat Besar		
	- Transportable Generating Set	2 Unit	
	Alat-alat Angkutan		
	- Kendaraan Bermotor Roda 4 (empat)	5 Unit	
	- Kendaraan Bermotor Roda 2 (dua)	11 unit	
	Alat Kantor dan Rumah Tangga		
	- Lemari besi	25	
	- Lemari kayu	7	
	- Rak besi	16	
	- Rak kayu	1	
	- Filling Cabinet besi	8	
	- Brandkas	1	
	- Lemari sorok	3	
	- Lemari kaca	2	
	- CCTV	28	
	- Elektronik white board	1	
	- Alat penghancur kertas	1	
	- Mesin absensi	1	
	- Alat pengaman/sinyal	7	
	- LCD projector/infocus	2	
	- Meja rapat	6	
	- Meja resepsionis	3	
	- Meja ½ biro	30	
	- Kursi rapat	99	
	- Kursi tamu	5	
	- Kursi putar	65	
	- Meja komputer	25	
	- Sofa	5	
	- Mesin penghisap debu	1	
	- Lemari es	1	
	- AC Splyty	41	
	- Exhaust Fan	4	
	- Kompor gas	1	
	- Tabung gas	2	
	- Radio	1	
	- Televisi	26	
	- Sound system	2	
	- Microphone	2	
	- Unit power supply	5	
	- Tangga alumunium	2	
	- Dispenser	2	
	- Podium	1	
	- Handycam	1	
	- Audio mixing portable	2	
	- Audio visual	1	
	- Digital LED Running Text	37	
	- Video monitor	1	
	- Video mixer	1	
	- Camera film	2	
	- Lensa kamera	4	
	- GPS receiver	3	
	- PC	1	
	- Laptop	70	
	- Notebook	9	
	- Scanner	7	
	- Printer	21	
	- Server	28	
	- Router	10	
	- Rak server	4	
3	GOLONGAN GEDUNG DAN BANGUNAN		
	- Bangunan gedung kantor	5	
	- Bangunan parker terbuka semi permanen	1	
	- Taman	1	
	- Bangunan menara radio	1	
	- Bangunan menara antenna microwave/parabolic	16	
4	GOLONGAN JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI		
	- Instalasi komunikasi elektronik	41	
	- Jaringan transmisi tegangan 100 s/d 300 KVA	2	
	- Jaringan telepon diatas tanah kapasitas kecil	1	
5	GOLONGAN ASET TETAP LAINNYA		
	- Video	2	
6	GOLONGAN ASET LAINNYA		
	- Software	28	
	- Kajian	21	

Sumber : Data Aset Desember Tahun 2023

2.2.3. Sarana Penyebaran Informasi Dalam Pelayanan Publik

Informasi merupakan aset penting bagi suatu organisasi untuk mendukung efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas. Pada Dinas Komunikasi dan Informatika, aset informasi yang dimiliki, selain mendukung pencapaian kinerja pelaksanaan tugas, juga merupakan produk yang harus disebarluaskan sebagai bagian dari pelayanan publik Dinas Komunikasi dan Informatika. Sarana penyebaran informasi yang dimiliki oleh Diskominfo Jawa Barat disajikan dalam **Tabel 2.6**.

Tabel 2.6 Rekapitulasi Sarana Penyebaran Informasi yang Dimiliki Dinas Komunikasi dan Informatika

No.	Uraian
1.	Papan Pengumuman
2.	Website Dinas: a. (diskominfo.jabarprov.go.id) b. (ppid.cirebonkab.go.id) c. (opendata.cirebonkab.go.id)
3.	Website Kabupaten (cirebonkab.go.id)
4.	Front office khusus pelayanan informasi
5.	WA dan Media Sosial : a. Instagram @diskominfokabcirebon, @cirebonkab, @cirebonkabsaberhoaks b. Facebook @diskominfokabcirebon, @cirebonkab c. TikTok @humas_ikp_cirkab d. Youtube @cirebonkabtv
6.	Manajemen email: a. (diskominfo@cirebonkab.go.id)
7.	Videotron
8.	Mobil Wawar Keliling

Sumber: Hasil pengumpulan data tahun 2023

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika

Berdasarkan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2019 – 2024, Dinas Komunikasi dan Informatika mengampu 5 (lima) Indikator Kinerja Utama (IKU), seperti yang disampaikan pada **Tabel 2.7**.

Tabel 2.7 Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika

No.	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Target IKU Perangkat Daerah					Realisasi IKU Perangkat Daerah					Capaian IKU Perangkat Daerah (dalam %)				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Indeks Domain Tata Kelola SPBE	Persen	2,57	2,67	2,77	2,87	2,97	2,57	2,00	2,70	2,40	-	100	71,54	97,47	83,62	-
2.	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Poin	56,63	40	45	50	57	31,87	76,69	81,70	90,92	-	56,28	184,70	181,56	181,84	-
3.	Persentase pengelolaan dan layanan data statistik sektoral	Persen	40	52,50	65	77,50	90	58,05	57,50	76,35	77,52	-	145,13	109,52	117,46	100,03	-
4.	Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	Level	II	II	II	II	II	II	II	II	II	-	100	100	100	100	-
5.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Poin	3,55	3,57	3,59	3,61	3,63	3,56	3,572	3,594	3,612	-	100	100,06	100,14	100,06	-

Sumber: LKIP Diskominfo Tahun 2020-2022 ; Aplikasi Simonek

Sasaran kesatu dalam Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2019 - 2024 adalah “Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi” yang diukur kinerjanya dengan indikator indeks domain tata kelola SPBE. Kinerja pada sasaran ini, pada tahun 2020, telah mencapai 2.57 poin. Sementara pada tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 2.00 poin. Hal ini dikarenakan terdapat perubahan instrumen pengukuran indikator berdasarkan Permenpan RB Nomor 59 tahun 2020. Sedangkan di tahun 2020 mengalami peningkatan capaian kinerja menjadi 2.70 poin, hal ini didukung dengan upaya-upaya dalam meningkatkan aspek perencanaan strategis SPBE dan aspek penyelenggara SPBE .

Indeks Keterbukaan Informasi Publik adalah indikator yang mengukur kinerja sasaran “Meningkatnya pelayanan informasi publik dan partisipasi masyarakat menuju keterbukaan informasi publik”. Pada Tahun 2020-2023, pelaksanaan monitoring dan evaluasi Keterbukaan Informasi Publik berdasarkan Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016 tentang Metode dan Teknik Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik. Hasil monitoring dan evaluasi pada periode tersebut menunjukkan trend peningkatan kinerja dari tahun 2020 sampai tahun 2022 yang disebabkan : (1) Komunikasi antara pembuat kebijakan dengan para implementor sudah berjalan dengan cukup baik karena pelayanan dan ketepatan waktu yang jelas oleh pegawai. Namun, komunikasi antara implementor dengan publik dalam menyebarluaskan informasi belum sepenuhnya terpenuhi dengan baik, (2) Sumber daya yang ada dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik cukup memadai dengan mengoptimalkan sumber daya manusia dan portal website dalam mempublikasikan data dan informasi, (3) Sikap-sikap implementor dalam mengimplementasikan kebijakan keterbukaan informasi publik, dapat dikatakan baik karena berupaya menaati peraturan, saling mendukung antara pihak-pihak yang terkait juga adanya kerjasama yang dilakukan oleh implementor merupakan sikap-sikap yang mampu menunjang terjadinya implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik menjadi lebih maksimal.

Sasaran ketiga adalah “Meningkatnya pengelolaan dan layanan statistik sektoral dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah” yang diukur kinerjanya dengan indikator Persentase pengelolaan dan layanan statistik sektoral. Kinerja pada sasaran ini juga mengalami trend kenaikan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 dan telah mencapai 100% melebihi target yang ditetapkan dalam Renstra. Hal ini didukung (1) Adanya komitmen pimpinan dalam mencapai target keterisian data Sistem Informasi Pembangunan Daerah dan terpenuhinya target penyusunan dokumen statistik.

Sasaran keempat “Terwujudnya penyelenggaraan persandian” diukur kinerjanya melalui indikator Indeks Keamanan Informasi (KAMI). Capaian pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 telah mencapai target yang ditentukan yaitu Level II. Walaupun

demikian, Dinas Komunikasi dan Informatika mencatat masih perlu adanya peningkatan kinerja dalam area keamanan informasi: Kerangka Kerja dan Pengelolaan Aset, untuk mencapai angka Indeks Keamanan Informasi yang maksimal.

Sasaran kelima “Meningkatnya kualitas pelayanan dan akuntabilitas kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon” dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat. Capaian kinerja pada sasaran ini mengalami trend kenaikan dari tahun ke tahun sehingga diharapkan Dinas Komunikasi dan Informatika termotivasi untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada perangkat daerah lain ataupun masyarakat.

Alokasi anggaran untuk Dinas Komunikasi dan Informatika menunjukkan kenaikan dari tahun 2020 – 2023. Hal ini disebabkan adanya program prioritas pembangunan dalam penguatan infrastruktur IT dan SPBE di Kabupaten Cirebon.

Tabel 2.8. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Tahun 2020

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	808.628.900,00	801.272.649,00	99,09
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	148.040.000,00	147.677.517,00	99,76
Program Peningkatan Pengembangan Sistem pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	84.674.700,00	82.264.950,00	97,15
Program Pengembangan Sistem Perencanaan Sektoral	42.853.800,00	42.853.550,00	99,99
Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	1.558.680.500,00	1.515.644.485,00	97,24
Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	7.088.512.200,00	6.942.863.771,00	97,95
Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	606.529.700,00	599.727.744,00	98,88
Program Penyelenggaraan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	141.231.500,00	132.519.584,00	93,83
Program Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Menara Telekomunikasi	66.705.000,00	65.486.084,00	98,17
JUMLAH	10.545.856.300,00	10.330.310.334,00	97,96

Tabel 2.9 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Tahun 2021 - 2023

Uraian	Anggaran pada tahun			Realisasi Anggaran pada tahun			Rasio antara realisasi dan anggaran tahun (dalam %)		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.405.314.392,00	5.983.966.717,00	6.360.782.570,00	4.912.406.118,00	5.603.199.626,00	5.738.495.927	90,88	93,64	90,22
Program Informasi dan Komunikasi Publik	2.943.686.050,00	2.893.403.900,00	4.259.555.300,00	2.915.037.104,00	2.881.549.528,00	4.249.597.010	99,03	99,59	99,77
Program Aplikasi Informatika	4.060.741.220,00	4.369.786.724,00	5.986.451.518,00	4.040715.870,00	4.362.712.801,00	5.924.097.397	99,51	99,84	98,96
Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	626.366.150,00	319.609.650,00	606.160.100,00	603.326.964,00	318.933.311,00	599.848.174	96,32	99,79	98,96
Program Penyelenggaraan Persandain untuk Pengamanan Informasi	240.391.900,00	195.884.050,00	222.754.500,00	238.790.260,00	195.875.410,00	222.510.492	99,33	99,99	99,89
JUMLAH	13.276.499.712,00	13.762.651.041,00	17.435.703.988,00	12.710.276.316,00	13.362.270.676,00	16.734.549.000	95,74	97,09	95,98

2.4 Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok sasaran layanan Dinas Komunikasi dan Informatika adalah: Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon, Masyarakat Kabupaten Cirebon, mitra media (massa, online, FK METRA, KIM, RTIK) dan ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon.

2.5 Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Tantangan Pengembangan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika

2.5.1 Kekuatan

- a. Tersedianya infrastruktur TIK yang memadai;
- b. Tersedianya SDM dengan jumlah dan kualitas yang cukup memadai;
- c. Tersedianya regulasi sebagai dasar penyediaan layanan Perangkat Daerah.

2.5.2 Kelemahan

- a. Pemanfaatan sarana prasarana belum optimal;
- b. Belum meratanya jumlah dan kualitas SDM setiap Perangkat Daerah;
- c. Proses bisnis Perangkat Daerah yang belum terintegrasi, baik dalam lingkup Perangkat Daerah.

2.5.3 Peluang

- a. Fungsi Perangkat Daerah sebagai organisasi inti dalam pengembangan *SMART Government* berbasis data dan informasi yang akurat dan aman;
- b. Pembentukan Team of Teams lingkup Pemerintah Kabupaten Cirebon dalam penyelenggaraan urusan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik, serta bidang persandian.

2.5.4 Tantangan

- a. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang berjalan sangat cepat;
- b. Pemahaman akan sistem teknologi informasi masih rendah;
- c. Perubahan kebijakan pemerintah.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Dinas Komunikasi dan Informatika mengambil peran dalam isu strategis lingkup bidang pemerintahan pada Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2025-2026 yaitu untuk isu strategis reformasi birokrasi dan isu strategis e-government. Sementara itu, capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika pada periode tahun 2019 – 2023 menunjukkan masih ada indikator kinerja yang belum tercapai. Mandat yang diharapkan untuk dilaksanakan Dinas Komunikasi dan Informatika serta capaian kinerja yang dihasilkan menjadi bahan dalam penyusunan permasalahan dan ditetapkan sebagai isu strategis Dinas yang harus dikelola untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan pada periode berikutnya.

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Capaian Kinerja

a. Sub Urusan Aplikasi Informatika

Permasalahan pada Sub Urusan Aplikasi Informatika terhadap capaian kinerja pada Indeks Domain Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah :

- 1) Belum tersedianya rujukan untuk penyusunan kebijakan internal tata kelola SPBE secara lengkap;
- 2) Belum dilakukan reviu dokumen perencanaan strategis SPBE secara berkala;
- 3) Belum optimalnya penyelenggaraan Tim Koordinasi SPBE;
- 4) Belum tersedianya pedoman pelaksanaan audit Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- 5) Belum terintegrasinya layanan administrasi pemerintahan dalam satu kanal.

b. Sub Urusan Informasi dan Komunikasi Publik

Permasalahan pada Sub Urusan Informasi dan Komunikasi Publik terhadap capaian kinerja pada Indeks Keterbukaan Informasi Publik adalah :

- 1) Belum dipahaminya kewajiban penyampaian informasi publik sesuai regulasi;
- 2) Belum adanya mekanisme agar informasi dapat dibagi pakaikan antar perangkat daerah;
- 3) Belum maksimalnya kerja sama dalam mekanisme penyampaian informasi publik;
- 4) Belum tersedianya kebijakan yang menyeluruh terkait hak dan kewajiban publik atas informasi.

c. Urusan Statistik

Permasalahan pada Urusan Statistik terhadap capaian kinerja pada penyelenggaraan pengelolaan dan layanan statistik sektoral adalah :

- 1) Belum dilaksanakannya reviu atas kebijakan/regulasi penyelenggaraan Satu Data secara berkala;

- 2) Belum dilaksanakannya regulasi terkait penyelenggara Statistik Sektorial secara maksimal;
- 3) Belum tersedianya tata kelola pemanfaatan data, baik data statistik maupun data spasial, yang menyeluruh;
- 4) Setiap data yang dihasilkan Perangkat Daerah selaku Produsen data tidak memiliki metadata, sehingga memungkinkan terjadinya perbedaan persepsi sehingga menyebabkan kesalahan interpretasi data;

d. Urusan Persandian

Permasalahan pada Urusan Persandian terhadap capaian kinerja pada Indeks Keamanan Informasi adalah :

- 1) Belum dilaksanakannya kebijakan, strategi penerapan, dan prosedur pengelolaan keamanan informasi secara maksimal;
- 2) Belum optimalnya penerapan, pemantauan, evaluasi dan perbaikan berkelanjutan SNI ISO/IEC 27001 Sistem Manajemen Keamanan Informasi;
- 3) Belum semua pelaksana pengamanan informasi memiliki kompetensi sesuai standar yang dipersyaratkan.

3.2 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga

Telaahan Kementerian atau Lembaga terkait merupakan cara untuk melaksanakan proses keselarasan perencanaan antara tingkat Provinsi maupun Nasional. Oleh karena itu, dalam penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika dilakukan telaahan terhadap Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika, Renstra Badan Pusat Statistik dan Renstra Badan Siber dan Sandi Negara. Penelahaan terutama dilakukan untuk mengetahui tujuan, sasaran dan indikator tujuan Renstra Kementerian/Lembaga.

a. Telaahan Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika

Fokus Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika diarahkan untuk mencapai 3 (tiga) tujuan utama yaitu percepatan penyediaan infrastruktur TIK ke seluruh wilayah Indonesia, percepatan transformasi digital dalam 3 (tiga) kerangka nasional yaitu industri, pemerintahan dan masyarakat dan peningkatan kualitas pengelolaan komunikasi publik.

Tabel 3.1 Sasaran Strategis dan Program Kemenkominfo 2020-2024

No.	Sasaran Strategis	Program
1	Meningkatnya cakupan jaringan pita lebar yang cepat dan terjangkau	Program Penyediaan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Teknologi
2	Meningkatnya cakupan wilayah yang terlayani penyiaran digital	
3	Meningkatnya konektivitas layanan pos	
4	Terwujudnya konektivitas <i>Next Generation Broadband</i> Nasional	
6	Meningkatnya pemanfaatan spektrum frekuensi radio dan kualitas pengelolaan layanan publik bidang pos, telekomunikasi dan informatika	Program Pengelolaan Spektrum Frekuensi, Standar Perangkat dan Layanan Publik
7	Meningkatnya pemanfaatan TIK di sektor ekonomi dan bisnis	
7	Terwujudnya masyarakat yang cerdas digital	Program Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi
8	Dukungan implementasi digitalisasi pemerintah	
9	Meningkatnya kualitas pengelolaan informasi dan komunikasi publik	Program Komunikasi Publik
10	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	Program Dukungan Manajemen

Tabel 3.2 Sandingan Tujuan dan Sasaran Kemenkominfo dengan Renstra Diskominfo Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2026

Renstra Kemenkominfo Tahun 2020-2024		Renstra Diskominfo Kab Cirebon Tahun 2025-2026	
Tujuan	Sasaran Strategis	Tujuan	Sasaran Strategis
Percepatan transformasi digital dalam 3 (tiga) kerangka nasional yaitu industri, pemerintahan dan masyarakat	Terwujudnya masyarakat yang cerdas digital	Meningkatkan Kualitas Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Meningkatnya tata kelola Sistem Pemerintahan berbasis elektronik
	Dukungan implementasi digitalisasi pemerintah		
Peningkatan kualitas pengelolaan komunikasi publik	Meningkatnya kualitas pengelolaan informasi dan komunikasi publik		Meningkatnya keterbukaan informasi publik
Penyediaan infrastruktur TIK ke seluruh wilayah Indonesia	Meningkatnya cakupan jaringan pita lebar yang cepat dan terjangkau		-
	Meningkatnya konektivitas layanan pos	-	
	Terwujudnya konektivitas <i>Next Generation Broadband</i> Nasional	-	
	Meningkatnya pemanfaatan spectrum frekuensi radio dan kualitas pengelolaan layanan publik bidang pos, telekomunikasi dan informatika	-	

Bedasarkan Tabel 3.2 bahwa sasaran Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025-2026 telah diselaraskan dengan sasaran Renstra Kemenkominfo Tahun 2020-2024. Adapun untuk Tujuan “Penyediaan infrastruktur TIK ke seluruh wilayah Indonesia” berikut sasarannya merupakan peran Kementerian Komunikasi dan Informatika.

b. Telaahan Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika

Fokus Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika diarahkan untuk mencapai 3 (tiga) tujuan utama yaitu percepatan penyediaan infrastruktur TIK ke seluruh wilayah Indonesia, percepatan transformasi digital dalam 3 (tiga) kerangka nasional yaitu industri, pemerintahan dan masyarakat dan peningkatan kualitas pengelolaan komunikasi publik

Tabel 3.3 Sasaran Strategis dan Program Kemenkominfo 2020-2024

No.	Sasaran Strategis	Program
1	Meningkatnya keterbukaan informasi publik Pemerintah daerah provinsi jawa Barat	Program Informasi Komunikasi Publik
2	Meningkatnya kualitas Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Program Aplikasi Informatika
3	Terpenuhinya dukungan manajemen perkantoran	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
4	Meningkatnya pengelolaan dan layanan statistik sektoral dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
5	Meningkatnya kualitas persandian dan keamanan informasi	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi

Tabel 3.4 Sandingan Tujuan dan Sasaran Diskominfo Jabar dengan Renstra Diskominfo Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2026

Renstra Diskominfo Jabar Tahun 2024-2026		Renstra Diskominfo Kab Cirebon Tahun 2025-2026	
Tujuan	Sasaran Strategis	Tujuan	Sasaran Strategis
Terciptanya demokrasi dan birokrasi yang berkualitas dan didukung oleh inovasi daerah	Meningkatnya keterbukaan informasi publik Pemerintah daerah provinsi Jawa Barat	Meningkatkan Kualitas Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Meningkatnya keterbukaan informasi publik
	Meningkatnya kualitas Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik		Meningkatnya tata kelola Sistem Pemerintahan berbasis elektronik
	Terpenuhinya dukungan manajemen perkantoran		Meningkatnya layanan penunjang urusan komunikasi dan informatika, urusan statistik dan urusan persandian
	Meningkatnya pengelolaan dan layanan statistik sektoral dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah		Meningkatnya pengelolaan dan layanan statistik sektoral
	Meningkatnya kualitas persandian dan keamanan informasi		Meningkatnya pengelolaan persandian dan keamanan informasi

c. Telaahan Renstra Badan Pusat Statistik

Sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan statistik dasar, melakukan koordinasi dan kerjasama serta mengembangkan dan membina statistik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam rangka mewujudkan tugas dan fungsinya tersebut, sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Badan Pusat Statistik Tahun 2020-2024 menetapkan Visi Badan Pusat Statistik Tahun 2020-2024 yaitu:

“Penyedia Data Statistik Berkualitas untuk Indonesia Maju”

Visi tersebut diwujudkan melalui misi sebagai berikut:

1. Menyediakan statistik berkualitas yang berstandar nasional dan internasional,
2. Membina K/L/D/I melalui Sistem Statistik Nasional yang berkesinambungan,
3. Mewujudkan pelayanan prima di bidang statistik untuk terwujudnya Sistem Statistik Nasional,
4. Membangun SDM yang unggul dan adaptif berlandaskan nilai profesionalisme, integritas dan amanah.

Tabel 3.5 Sandingan Tujuan dan Sasaran BPS dengan
Renstra Diskominfo Kabupaten Cirebon Tahun 2025 - 2026

Renstra Badan Pusat Statistik Tahun 2020-2024		Renstra Diskominfo Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2026	
Tujuan	Sasaran Strategis	Tujuan	Sasaran Strategis
Menyediakan data statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan	Meningkatnya pemanfaatan data statistik yang berkualitas	Meningkatkan Kualitas Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Meningkatnya pengelolaan dan layanan statistik sektoral
Meningkatnya kolaborasi, integrasi, dan standarisasi dalam penyelenggaraan SSN	Penguatan komitmen K/L/D/I terhadap SSN		
Meningkatnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN	Penguatan statistik sektoral K/L/D/I		

Bedasarkan Tabel 3.3 bahwa sasaran Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2026 telah diselaraskan dengan sasaran Badan Pusat Statistik Tahun 2020- 2024

d. Telaahan Renstra Badan Siber dan Sandi Negara

Renstra Badan Siber dan Sandi Negara Tahun 2020-2024 mengedepankan pembangunan siber dan sandi nasional sesuai amanah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020–2024 untuk mewujudkan kedaulatan, ketahanan, dan perlindungan siber. Hal ini sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dalam melaksanakan keamanan siber secara efektif dan efisien dengan memanfaatkan, mengembangkan, dan mengonsolidasikan semua unsur yang terkait dengan keamanan siber yang tertuang di dalam Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2017 tentang Badan Siber dan Sandi Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 133 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2017 tentang Badan Siber dan Sandi Negara. Untuk mencapai hal tersebut ditetapkan tujuan dan sasaran strategis Badan Siber dan Sandi Negara sebagaimana disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 3.6 Tujuan dan Sasaran strategis Badan Siber dan Sandi Negara
Tahun 2020-2024

No.	Tujuan	Sasaran
1	Terwujudnya kedaulatan keamanan Siber Indonesia	Meningkatnya Maturitas Keamanan Siber di Indonesia
		Terwujudnya penyelenggaraan keamanan siber dan sandi yang prima

Tabel 3.7 Sandingan Tujuan dan Sasaran BSSN dengan
Renstra Diskominfo Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2026

Renstra Badan Siber dan Sandi Negara Tahun 2020-2024		Renstra Diskominfo Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2026	
Tujuan	Sasaran Strategis	Tujuan	Sasaran Strategis
Terwujudnya kedaulatan keamanan Siber Indonesia	Meningkatnya Maturitas Keamanan Siber di Indonesia	Meningkatkan Kualitas Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Meningkatnya pengelolaan persandian dan keamanan informasi
	Terwujudnya penyelenggaraan keamanan siber dan sandi yang prima		

Bedasarkan Tabel 3.7 bahwa sasaran Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2026 telah diselaraskan dengan sasaran Badan Siber dan Sandi Negara Tahun 2020-2024.

3.3 Mandat Penyelenggaraan Urusan Komunikasi dan Informatika, Statistik, dan Persandian

a. Mandat Urusan Komunikasi dan Informatika :

Sub Urusan Informasi dan Komunikasi Publik :

- 1) Sosialisasi peraturan bidang informasi dan komunikasi publik;
- 2) Monitoring informasi kebijakan, opini publik, dan aspirasi publik;
- 3) Penyusunan strategi komunikasi publik;
- 4) Penyusunan konten;
- 5) Diseminasi informasi dan pengelolaan media komunikasi publik;
- 6) Pelayanan informasi publik;
- 7) Relasi media;
- 8) Kemitraan komunikasi dengan komunitas informasi masyarakat;
- 9) Penguatan kapasitas sumberdaya manusia komunikasi publik;
- 10) Dukungan administratif, keuangan, dan tata kelola informasi di daerah dalam rangka penyelesaian sengketa informasi.

Sub Urusan Aplikasi Informatika :

- 1) Pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan sub domain di Lingkup Pemerintah Daerah;

- 2) Pengelolaan e-government di lingkup Pemerintah Daerah :
 - a) Tata kelola SPBE Pemerintah Daerah, meliputi : arsitektur SPBE, Peta Rencana SPBE, rencana dan anggaran SPBE, Proses Bisnis SPBE, Data dan Informasi Elektronik, Infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, keamanan SPBE, dan layanan SPBE;
 - b) Manajemen SPBE, meliputi : manajemen risiko, manajemen keamanan informasi, manajemen data, manajemen aset TIK, manajemen SDM, manajemen pengetahuan, manajemen perubahan dan manajemen layanan SPBE;
 - c) Audit TIK (audit infrastruktur SPBE, audit aplikasi khusus, audit keamanan infrastruktur SPBE, audit keamanan aplikasi khusus);
 - d) Penyelenggara SPBE Pemerintah Daerah;
 - e) Promosi literasi SPBE dan kolaborasi penyelenggaraan SPBE;
 - f) Penyelenggaraan provinsi cerdas dengan memfasilitasi keterhubungan data dan/atau informasi, menyiapkan kebijakan penyelenggaraan provinsi cerdas, menyiapkan dukungan infrastruktur TIK dan aplikasi khusus, menyiapkan SDM yang kompeten di bidang TIK, menyelenggarakan ekosistem TIK.

b. Mandat Urusan Statistik :

Berdasarkan Peraturan BPS Nomor 4 Tahun 2019 :

- 1) Penyelenggaraan kegiatan statistik sektoral, terdiri dari :
 - a) Perencanaan data;
 - b) Pengumpulan data;
 - c) Pemeriksaan data; dan
 - d) Penyebarluasan data.
- 2) Penyelenggaraan survei dan hasilnya dipublikasikan harus mengikuti rekomendasi dari BPS.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 :

- 1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Informasi Geospasial Tematik;
- 2) Duplikat Informasi Geospasial Tematik sebagai bahan perpustakaan/kearsipan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah diserahkan kepada Perangkat Daerah yang bertanggungjawab di bidang perpustakaan/kearsipan;

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 :

- 1) Pemerintah Daerah menjadi bagian dari Jaringan Informasi Geospasial Daerah;
- 2) Pemerintah Daerah bertugas sebagai Simpul Jaringan yang melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penggunaan, pengamanan, dan penyebarluasan Data dan Informasi Geospasial.

c. Mandat Urusan Persandian (berdasarkan Peraturan BSSN Nomor 10 Tahun 2019):

- 1) Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota :
 - a) Penyusunan kebijakan pengamanan informasi;
 - b) Pengelolaan sumberdaya keamanan informasi;
 - c) Pengamanan sistem elektronik dan pengamanan informasi non elektronik;
 - d) Penyediaan layanan keamanan informasi.

- 2) Penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota :
 - a) Identifikasi pola hubungan komunikasi sandi;
 - b) Analisis pola hubungan komunikasi sandi.

3.4 Prioritas Pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024-2025

Prioritas pembangunan untuk mencapai target kinerja pembangunan untuk tahap akhir periode Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJDP) Kabupaten Cirebon Tahun 2024 – Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

- a. Bidang Komunikasi dan Informatika, diarahkan pada peningkatan inovasi kualitas pelayanan informasi, melalui upaya-upaya peningkatan inovasi teknologi informasi dalam manajemen pemerintahan dan peningkatan inovasi teknologi informasi dalam pelayanan publik;
- b. Bidang Statistik, diarahkan pada peningkatan pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah melalui upaya-upaya peningkatan akses, akurasi dan kecepatan pemenuhan Data Pembangunan;
- c. Bidang Persandian, diarahkan pada pengamanan informasis, melalui upaya peningkatan kualitas keamanan informasi.

3.5 Penetapan Isu Strategis

Isu strategis didefinisikan sebagai suatu kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah. Kriteria masalah yang layak untuk menjadi isu strategis adalah sebagai berikut :

- a. Memiliki dampak yang signifikan bagi Daerah;
- b. Bersifat penting, mendasar, dan mendesak;
- c. Memiliki jangka waktu menengah atau panjang;
- d. Menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan datang.

Memperhatikan kriteria penetapan isu strategis; mandat penyelenggaraan urusan Komunikasi dan Informatika, Statistik, dan Persandian; prioritas pembangunan bidang komunikasi dan informatika dalam RPJPD Kabupaten Cirebon Tahun 2005 – 2025, isu strategis Dinas dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Kebijakan tata kelola SPBE, mencakup perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi SPBE;
2. Optimalisasi teknologi informasi dan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik;
3. Tata kelola penyampaian informasi publik, yang mencakup penyampaian informasi publik berdasarkan klasifikasinya, serta mekanisme berbagi informasi antar Perangkat Daerah;
4. Tata kelola penyelenggara dan penyelenggaraan data statistik sektoral;
5. Tata kelola penyelenggaraan keamanan informasi dan persandian.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Mengacu kepada kepada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berakhir pada Tahun 2024, tujuan dan sasaran Perangkat Daerah tahun 2025 – 2026 harus selaras dengan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025 – 2026. Tujuan dan sasaran pembangunan dalam Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025 – 2026 mengacu pada Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025 – 2026 dengan indikator kinerja sasaran ditetapkan secara realistis namun mampu menghadapi tantangan dalam mengoptimalkan peluang dan potensi yang dimiliki.

Tabel 4.1 Keterkaitan Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Cirebon dengan Tujuan dan Sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025 – 2026

No.	Tujuan RPD	Sasaran RPD	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra
1.	Mewujudkan sistem tata kelola pemerintahan yang adaptif, inovatif dan kolaboratif	Meningkatkan akuntabilitas tata kelola pemerintahan Indikator: Nilai SAKIP	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah Indikator; Nilai SAKIP	Meningkatnya layanan penunjang urusan komunikasi dan informatika, urusan statistik dan urusan persandian
2.	Mewujudkan Sistem Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif, Inovatif dan Kolaboratif Indikator : Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan Indikator : Indeks Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik (SPBE)	Meningkatkan Kualitas Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Indikator : Indeks Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik (SPBE)	1. Meningkatkan tata kelola Sistem Pemerintahan berbasis elektronik 2. Meningkatkan keterbukaan informasi publik Pemerintah 3. Meningkatkan pengelolaan dan layanan statistik sektoral 4. Meningkatkan pengelolaan persandian dan keamanan informasi

Indikator Sasaran adalah alat ukur pencapaian kinerja sasaran dalam bentuk hasil (*Outcome*). Perumusan pernyataan tujuan dan sasaran beserta indikator yang disertai dengan target selama 2 (dua) tahun dapat dicermati pada tabel 4.2, tabel 4.3 dan tabel 4.4 berikut ini :

Tabel 4.2 Indikator Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Rumus Perhitungan	Kondisi Th. 2024	Target	
					2025	2026
Meningkatnya layanan penunjang urusan komunikasi dan informatika, urusan statistik dan urusan persandian	Nilai LKIP	Nilai	Total dari nilai persepsi per unsur dibagi total unsur yang terisi dikali nilai penimbang	70,70	70,75	70,80
Meningkatnya tata kelola Sistem Pemerintahan berbasis elektronik	Indeks Domain Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Poin	Rata-rata nilai tertimbang dari tingkat kematangan Domain Tata Kelola SPBE	2,97	2,98	2,99
	Indeks Domain Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Poin	Rata-rata nilai tertimbang dari tingkat kematangan Domain Layanan SPBE	3,00	3,05	3,10
Meningkatnya keterbukaan informasi publik Pemerintah	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Poin	Rata-rata nilai tertimbang dari sub indikator keterbukaan informasi publik	57	75	80
Meningkatnya pengelolaan dan layanan statistik sektoral	Tingkat ketersediaan data statistik sektoral	Persen	Jumlah data statistik sektoral yang telah dimutakhirkan /Jumlah total data statistik sektoral yang harus disediakan x 100%	80	80	85
Meningkatnya pengelolaan persandian dan keamanan informasi	Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	Level	Jumlah angka tertimbang dari tingkat kematangan setiap area keamanan informasi	II	II	III

Tabel 4.3 Indikator Kinerja Program

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Rumus Perhitungan	Satuan	Target	
				2025	2026
Terpenuhinya layanan administrasi perkantoran	Nilai IKM Diskominfo	Total nilai persepsi per unsur dibagi total unsur yang terisi dikali nilai penimbang	Poin	90,50	90,60
Meningkatnya layanan administrasi pemerintahan dan layanan publik berbasis elektronik	Persentase jaringan TIK di lingkup Pemerintah Kabupaten Cirebon	Jumlah perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan administrasi pemerintahan dan layanan publik / jumlah perangkat daerah Kabupaten Cirebon x 100%	Persen	100	100
	Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan administrasi pemerintahan dan layanan publik	Rata-rata persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan administrasi pemerintahan dan layanan publik	Persen	58,33	66,67
Meningkatnya masyarakat Kabupaten Cirebon yang informatif	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah,	Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah / Jumlah penduduk x 100%	Persen	81	82
Meningkatnya penggunaan data statistik dalam menyusun Evaluasi Pembangunan Daerah Organisasi Perangkat Daerah	Persentase perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	Jumlah perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah / Jumlah perangkat daerah Kabupaten Cirebon x 100%	Persen	100	100
Terselenggaranya persandian untuk pengamanan informasi	Tingkat keamanan informasi	Jumlah nilai per area keamanan informasi / Jumlah area penilaian x 100%	Persen	63,38	70,42

Tabel 4.4 Indikator Kinerja Kegiatan

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	
			2025	2026
Tersedianya perangkat daerah yang terkoneksi jaringan internet	Jumlah perangkat daerah yang terkoneksi jaringan internet yang disediakan	Perangkat daerah	100	100
Terselenggaranya perangkat daerah yang menggunakan layanan infrastruktur SPBE	Jumlah perangkat daerah yang menggunakan layanan infrastruktur SPBE	Perangkat daerah	100	100
Terlaksananya kebijakan dan program prioritas pemerintah yang terinformasikan kepada masyarakat sesuai (STRAKOM) dan SOP yang telah ditetapkan	Jumlah kebijakan dan program prioritas pemerintah yang terinformasikan kepada masyarakat sesuai (STRAKOM) dan SOP yang telah ditetapkan	Konten	5000	5500
Termanfaatkannya data statistik daerah oleh perangkat daerah	Jumlah perangkat daerah yang memanfaatkan buku statistik daerah	Perangkat daerah	31	31
Tersedianya sistem elektronik yang menerapkan prinsip sistem manajemen keamanan informasi	Jumlah sistem elektronik yang menerapkan prinsip sistem manajemen keamanan informasi	Sistem elektronik	3	3
Terselenggaranya titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik pada pemerintah daerah berdasarkan Pola Hubungan Komunikasi Sandi (PHKS) yang ditetapkan	Jumlah titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik pada pemerintah daerah berdasarkan Pola Hubungan Komunikasi Sandi (PHKS) yang ditetapkan	Perangkat daerah	4	5
Tersusunnya dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang telah disusun	Dokumen	22	21
Tersusunnya laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	26	26
Tersusunnya dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dokumen	1	1
Terpenuhinya layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah jenis layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jenis	8	8
Terpenuhinya Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintah Daerah yang diadakan	Jumlah jenis Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintah Daerah yang diadakan	Jenis	4	4
Terpenuhinya penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia	Jumlah jenis penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia	Jenis	6	6
Terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	Jumlah jenis Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	Jenis	5	5

***Cascading* Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025 – 2026**

Dinas Komunikasi dan Informatika berupaya menjadi instansi pemerintah yang berorientasi pada hasil dengan berfokus pada pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki secara efektif dan efisien. Adapun desain kinerja dapat diuraikan pada *Cascading* sebagai berikut:

Tabel 4.5 Cascading kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon Tahun 2025 – 2026

No	Tujuan RPD		Sasaran RPD		Tujuan Diskominfo			Sasaran Diskominfo				Sasaran Program				Uraian Kegiatan				
	Uraian Tujuan RPD	Indikator Kinerja	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Uraian Tujuan Diskominfo	Indikator Tujuan	Target		Uraian Sasaran Diskominfo	Indikator Sasaran	Target		Uraian Program	Indikator Program	Target					
							2025	2026			2025	2026			2025		2026			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
1	Mewujudkan Sistem Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif, Inovatif dan Kolaboratif	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya akuntabilitas tata kelola pemerintahan	Nilai SAKIP	Meningkatnya akuntabilitas tata kelola pemerintahan	Nilai SAKIP	68,5	69	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai LKIP	70,75	70,80	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Nilai IKM Diskominfo	90,50	90,60	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
																		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
																			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
																			Administrasi Umum Perangkat Daerah	
																			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
																				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
																				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
			Meningkatnya Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan	Indeks SPBE	Meningkatkan Kualitas Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks SPBE	3,25	3,27	Meningkatnya Tata Kelola dan Layanan Sistem Pemerintahan berbasis elektronik	Indeks Domain Tata Kelola SPBE	2,98	2,99	Program Aplikasi Informatika	Persentase perangkat daerah terfasilitasi jaringan TIK	100	100	Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kab/Kota			
									Indeks Domain Layanan SPBE	3,05	3,10		Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan administrasi pemerintahan dan layanan publik	58,33	66,67	Pengelolaan e-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kab/Kota				
									Meningkatnya keterbukaan informasi publik	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	75	80	Program Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah	81	82	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kab/Kota			
									Meningkatnya pengelolaan dan layanan statistik sektoral	Tingkat Ketersediaan Data Statistik Sektoral	80	85	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	100	100	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kab/Kota			
									Meningkatnya pengelolaan persandian dan keamanan informasi	Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	2	3	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal	63,38	70,42	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kab/Kota			
																	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Kab/Kota			

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Tujuan dan sasaran Rencana Strategis yang telah disajikan pada bab sebelumnya akan dicapai melalui serangkaian strategi dan arah kebijakan. Strategi adalah langkah-langkah yang berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan untuk mencapai sasaran Renstra. Selanjutnya arah kebijakan menjadi penjabaran strategi yang menjadi rujukan untuk penentuan program prioritas pencapaian sasaran pembangunan. Mengacu kepada kepada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berakhir pada Tahun 2024 dan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025 – 2026.

Memperhatikan sasaran dan arah kebijakan tersebut, serta mempertimbangkan permasalahan dan isu strategis dalam bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian, strategi dan arah kebijakan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Renstra disajikan dalam Tabel 5.1.

Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1.	Meningkatnya akuntabilitas tata kelola pemerintahan	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Peningkatan kualitas pelayanan perencanaan dan pelaporan Dinas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kesesuaian Perencanaan Daerah dan Perencanaan Dinas; 2. Peningkatan ketersediaan data dan informasi Dinas; 3. Peningkatan kesesuaian laporan kinerja dan laporan keuangan Dinas
			Peningkatan kualitas pelayanan administrasi keuangan Dinas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan akurasi dan kecepatan dalam pengelolaan keuangan Dinas.
			Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kerja yang sesuai standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengadaan sarana dan prasarana kerja untuk mendukung kinerja pegawai; 2. Pemeliharaan sarana dan prasarana kerja untuk mendukung kinerja pegawai.
2.	Meningkatkan Kualitas Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Meningkatnya tata kelola dan layanan Sistem Pemerintahan berbasis elektronik	Peningkatan kualitas penyelenggaraan tata kelola SPBE	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penerapan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE; 2. Pengembangan inovasi proses bisnis SPBE; 3. Peningkatan layanan pusat data; 4. Peningkatan layanan jaringan intra pemerintah; 5. Peningkatan penggunaan sistem penghubung layanan instansi; 6. Peningkatan Tim Koordinasi SPBE; 7. Perbaikan kebijakan tata kelola SPBE;
			Peningkatan kualitas layanan SPBE	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penataan proses bisnis administrasi pemerintahan dan pelayanan publik; 2. Penyelenggaraan layanan SPBE secara terintegrasi;
		Meningkatnya keterbukaan informasi publik	Peningkatan kualitas tata kelola informasi dan komunikasi publik;	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan keterbukaan informasi publik; 2. Penyusunan regulasi tata kelola pengelolaan informasi dan komunikasi publik; 3. Optimalisasi peran dan fungsi PPID.
			Peningkatan kualitas pelayanan informasi dan komunikasi publik melalui berbagai media komunikasi;	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan penyebaran informasi publik dengan materi yang berkualitas; 2. Optimalisasi penyelenggaraan hubungan media dan kemitraan komunitas; 3. Peningkatan pemantauan opini dan aspirasi publik; 4. Pengembangan kapasitas sumber daya komunikasi publik; 5. Penyelenggaraan hubungan masyarakat; 6. Optimasi media komunikasi publik milik pemerintah; 7. Peningkatan kualitas pengelolaan pengaduan masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan publik <p>Penyediaan dukungan terhadap kelembagaan Komisi Informasi.</p>
		Meningkatnya pengelolaan dan layanan statistik sektoral	Peningkatan ketersediaan data dan informasi statistik sektoral yang tervalidasi dan terverifikasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kepercayaan pengguna data sektoral terhadap kualitas data yang disajikan
		Meningkatnya pengelolaan persandian dan keamanan informasi	Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan keamanan informasi dan persandian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon (Elektronik dan Non Elektronik) 2. Optimalisasi kebijakan, strategi penerapan, dan prosedur pengelolaan keamanan informasi; 3. Optimalisasi penerapan, pemantauan, evaluasi dan perbaikan berkelanjutan SNI ISO/IEC 27001; 4. Peningkatan kompetensi SDM pengelola keamanan informasi; 5. Peningkatan kesadaran keamanan informasi

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Sasaran Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025 – 2026, yaitu :

1. Meningkatnya tata kelola Sistem Pemerintahan berbasis elektronik;
2. Meningkatnya keterbukaan informasi publik ;
3. Meningkatnya pengelolaan dan layanan statistik sektoral;
4. Meningkatnya pengelolaan persandian dan keamanan informasi;
5. Meningkatnya layanan penunjang urusan komunikasi dan informatika, urusan statistik dan urusan persandian

Sasaran tersebut dicapai melalui 5 (lima) program berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang kemudian dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, yakni sebagai berikut:

1. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
2. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
3. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
4. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi
5. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Adapun rencana pendanaan program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika pada Tahun 2025 - 2026 disajikan dalam tabel 6.1.

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatorif Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon
Tahun 2025-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan / Sub Kegiatan (output)	Kondisi Awal		Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					2023	2024	2025		2026		Kondisi Akhir			
					K	K	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Meningkatkan Kualitas Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Kinerja: Meningkatnya kualitas Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Tolok Ukur: Indeks SPBE	3,07 Poin	3,2	3,25	31.789.458.800	3,27	35.466.296.000	3,27	67.255.754.800		
			Meningkatnya Tata Kelola dan Layanan Sistem Pemerintahan berbasis elektronik	Kinerja: Meningkatnya tata kelola SPBE, Tolok Ukur: Indeks Domain Tata Kelola SPBE	2,4 Poin	2,97	2,98	350.000.000	2,99	350.000.000	2,99	700.000.000		
		03.	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Kinerja: Meningkatnya perangkat daerah terfasilitasi jaringan TIK, Tolok Ukur: Persentase perangkat daerah terfasilitasi jaringan TIK	100 Persen	100	100	350.000.000	100	350.000.000	100	700.000.000		
		03.2.01.	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kinerja: Tersedianya perangkat daerah yang terkoneksi jaringan internet, Tolok Ukur: Jumlah perangkat daerah yang terkoneksi jaringan internet yang disediakan	71 perangkat daerah	71	71	350.000.000	71	350.000.000	71	700.000.000		
		03.2.01.0004.	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	Kinerja: Terlaksananya Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa, Tolok Ukur: Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa	0 Dokumen	0	50	350.000.000	50	350.000.000	100	700.000.000	BIDANG STATISTIK, PERSANDIAN DAN E-GOVERNMENT	-(Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber); - (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)
			Meningkatnya Tata Kelola dan Layanan Sistem Pemerintahan berbasis elektronik	Kinerja: Meningkatnya layanan SPBE, Tolok Ukur: Indeks Domain Layanan SPBE	3,75 Poin	3	3,05	14.330.000.000	3,1	15.780.000.000	3,1	30.110.000.000		
		03.	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Kinerja: Meningkatnya perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan administrasi pemerintahan dan layanan publik, Tolok Ukur: Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan administrasi pemerintahan dan layanan publik	58,33 Persen	58,33	58,33	14.330.000.000	66,67	15.780.000.000	66,67	30.110.000.000		
		03.2.02.	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kinerja: Terselenggaranya perangkat daerah yang menggunakan layanan infrastruktur SPBE, Tolok Ukur: Jumlah perangkat daerah yang menggunakan layanan infrastruktur SPBE	71 perangkat daerah	71	71	14.330.000.000	71	15.780.000.000	71	30.110.000.000		
		03.2.02.0015.	Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	Kinerja: Terlaksananya Fasilitas Penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda, Tolok Ukur: Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	1 Laporan	12	12	400.000.000	12	500.000.000	24	900.000.000	BIDANG STATISTIK, PERSANDIAN DAN E-GOVERNMENT	-(Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)
		03.2.02.0016.	Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah	Kinerja: Terlaksananya penyelenggaraan pusat kendali pemerintah daerah, Tolok Ukur: Jumlah dokumen keterhubungan pusat kendali dengan Pusat Data Nasional	1 Dokumen	12	12	5.000.000.000	12	5.000.000.000	24	10.000.000.000	BIDANG TEKNOLOGI DAN INFORMATIKA	-(Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan / Sub Kegiatan (output)	Kondisi Awal		Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					2023	2024	2025		2026		Kondisi Akhir			
					K	K	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		03.2.02.0017.	Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi	Kinerja: Terlaksananya koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi. Tolok Ukur: Jumlah data dan informasi yang dipetakan berdasarkan Arsitektur SPBE pemerintah daerah	0 Dokumen	12	12	250.000.000	12	250.000.000	24	500.000.000	BIDANG STATISTIK, PERSANDIAN DAN E-GOVERNMENT	-(Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)
		03.2.02.0018.	Koordinasi penyusunan dan/atau reviu arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah	Kinerja: Terlaksananya koordinasi penyusunan dan/atau reviu arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah, Tolok Ukur: Jumlah dokumen arsitektur SPBE Pemerintah Daerah yang memuat 6 domain arsitektur dan peta rencana yang diusulkan	0 Dokumen	2	2	750.000.000	2	500.000.000	4	1.250.000.000	BIDANG STATISTIK, PERSANDIAN DAN E-GOVERNMENT	-(Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)
		03.2.02.0019.	Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	Kinerja: Terlaksananya Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE, Tolok Ukur: Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	0 Dokumen	12	12	300.000.000	12	350.000.000	24	650.000.000	BIDANG STATISTIK, PERSANDIAN DAN E-GOVERNMENT	-(Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)
		03.2.02.0020.	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Kinerja: Terlaksananya Pembangunan dan/atau Pengembangan aplikasi khusus SPBE, Tolok Ukur: Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	5 Aplikasi	5	30	850.000.000	30	1.000.000.000	60	1.850.000.000	BIDANG STATISTIK, PERSANDIAN DAN E-GOVERNMENT	-(Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)
		03.2.02.0021.	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Kinerja: Terlaksananya Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah, Tolok Ukur: Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	0 Aplikasi	0	10	400.000.000	10	500.000.000	20	900.000.000	BIDANG STATISTIK, PERSANDIAN DAN E-GOVERNMENT	-(Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)
		03.2.02.0023.	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	Kinerja: Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas, Tolok Ukur: Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan sosialisasi program Kabupaten/Kota Cerdas	71 unit	71	71	250.000.000	71	350.000.000	71	600.000.000	BIDANG STATISTIK, PERSANDIAN DAN E-GOVERNMENT	-(Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)
		03.2.02.0024.	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Kinerja: Terlaksananya Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota, Tolok Ukur: Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	71 Perangkat Daerah	71	71	5.000.000.000	71	6.000.000.000	142	11.000.000.000	BIDANG TEKNOLOGI DAN INFORMATIKA	-(Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)
		03.2.02.0025.	Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi	Kinerja: Terlaksananya Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi, Tolok Ukur: Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional	17 Layanan	17	17	300.000.000	21	400.000.000	38	700.000.000	BIDANG STATISTIK, PERSANDIAN DAN E-GOVERNMENT	-(Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)
		03.2.02.0026.	Fasilitasi penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	Kinerja: Terlaksananya Fasilitasi penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo, Tolok Ukur: Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	0 Dokumen	1	4	330.000.000	4	330.000.000	8	660.000.000	BIDANG STATISTIK, PERSANDIAN DAN E-GOVERNMENT	-(Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan / Sub Kegiatan (output)	Kondisi Awal		Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					2023	2024	2025		2026		Kondisi Akhir			
					K	K	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		03.2.02.0028.	Koordinasi dan Fasilitas Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	Kinerja: Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitas Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE, Tolok Ukur: Jumlah dokumen koordinasi Fasilitas Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	0 Dokumen	6	6	500.000.000	6	600.000.000	12	1.100.000.000	BIDANG STATISTIK, PERSANDIAN DAN E-GOVERNMENT	- (- Kecamatan sumber)
	Meningkatnya keterbukaan informasi publik			Kinerja: Mewujudkan Kabupaten Cirebon Informatif, Tolok Ukur: Indeks Keterbukaan Informasi Publik	90,92 Poin	70	75	12.490.000.000	80	13.821.000.000	80	26.311.000.000		
		02.	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Kinerja: Meningkatnya diseminasi informasi dan komunikasi publik kepada masyarakat, Tolok Ukur: Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah	75 Persen	80	81	12.490.000.000	82	13.821.000.000	82	26.311.000.000		
		02.2.01.	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kinerja: Terlaksananya kebijakan dan program pengelolaan informasi dan komunikasi publik, Tolok Ukur: Jumlah laporan kegiatan pengelolaan informasi dan komunikasi publik	12 Laporan	12	12	12.490.000.000	12	13.821.000.000	24	26.311.000.000		
		02.2.01.0014.	Relasi Media	Kinerja: Terlaksananya Relasi Media, Tolok Ukur: jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi di dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media	12 Laporan	12	12	3.750.000.000	12	4.125.000.000	24	7.875.000.000	BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	- (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)
		02.2.01.0015.	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Kinerja: Terlaksananya Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan, Tolok Ukur: Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	0 Komunitas	100	100	600.000.000	100	660.000.000	200	1.260.000.000	BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	- (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)
		02.2.01.0016.	Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	Kinerja: Terlaksananya Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, Tolok Ukur: Jumlah laporan Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah yang akuntabel serta disampaikan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika	12 Laporan	12	12	1.300.000.000	12	1.500.000.000	24	2.800.000.000	BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	- (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)
		02.2.01.0017.	Pelayanan Informasi Publik	Kinerja: Tersedianya Pelayanan Informasi Publik, Tolok Ukur: Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	0 Permohonan	60	60	2.800.000.000	60	3.080.000.000	120	5.880.000.000	BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	- (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)
		02.2.01.0018.	Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Kinerja: Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, Tolok Ukur: Persentase khalayak sasaran yang terpapar informasi terkait peraturan bidang informasi dan komunikasi publik	75 Persentase	80	81	80.000.000	82	100.000.000	82	180.000.000	BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	- (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)
		02.2.01.0019.	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Kinerja: Terlaksananya Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik, Tolok Ukur: Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	12 Rekomendasi	12	12	480.000.000	12	528.000.000	24	1.008.000.000	BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	- (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan / Sub Kegiatan (output)	Kondisi Awal		Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					2023	2024	2025		2026		Kondisi Akhir			
					K	K	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		02.2.01.0021.	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Kinerja: Terlaksananya Pengelolaan Media Komunikasi Publik, Tolok Ukur: Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	2 Media	5	5	530.000.000	5	583.000.000	10	1.113.000.000	BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	-(Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)
		02.2.01.0023.	Penyusunan Konten	Kinerja: Terlaksananya Penyusunan Konten, Tolok Ukur: Jumlah Konten Informasi Publik	365 Konten	365	365	2.300.000.000	365	2.530.000.000	730	4.830.000.000	BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	-(Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)
		02.2.01.0024.	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik	Kinerja: Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik, Tolok Ukur: Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan	0 Orang	30	150	650.000.000	150	715.000.000	300	1.365.000.000	BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	-(Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)
	Meningkatnya pengelolaan dan layanan statistik sektoral			Kinerja: Terselenggaranya Satu Data Kabupaten Cirebon, Tolok Ukur: Persentase Ketersediaan Data Statistik Sektoral	75,05 Persen	80	80	2.519.458.800	85	3.115.296.000	85	5.634.754.800		
	02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL		Kinerja: Terselenggaranya pengelolaan data statistik sektoral, Tolok Ukur: Persentase perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	100 Persen	100	100	2.519.458.800	100	3.115.296.000	100	5.634.754.800		
	02.2.01.	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		Kinerja: Termanfaatkannya data statistik daerah oleh perangkat daerah, Tolok Ukur: Jumlah perangkat daerah yang memanfaatkan data statistik daerah	71 perangkat daerah	71	71	2.519.458.800	71	3.115.296.000	71	5.634.754.800		
		02.2.01.0007.	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Kinerja: Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral, Tolok Ukur: Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik	0 Orang	0	71	321.700.000	71	428.210.000	142	749.910.000	BIDANG STATISTIK, PERSANDIAN DAN E-GOVERNMENT	-(Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)
		02.2.01.0008.	Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional	Kinerja: Meningkatnya Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional, Tolok Ukur: Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data Statistik untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan dan/atau Penyusunan Kebijakan	100 Persentase	100	100	177.700.000	100	301.010.000	100	478.710.000	BIDANG STATISTIK, PERSANDIAN DAN E-GOVERNMENT	-(Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)
		02.2.01.0009.	Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral	Kinerja: Meningkatnya kualitas data Statistik Sektoral, Tolok Ukur: Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu	0 Persentase	0	100	252.000.000	100	267.600.000	100	519.600.000	BIDANG STATISTIK, PERSANDIAN DAN E-GOVERNMENT	-(Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)
		02.2.01.0010.	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	Kinerja: Terwujudnya Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia, Tolok Ukur: Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata	0 Dokumen	1	1	1.300.000.000	1	1.400.000.000	2	2.700.000.000	BIDANG STATISTIK, PERSANDIAN DAN E-GOVERNMENT	-(Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)
		02.2.01.0011.	Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	Kinerja: Terlaksananya Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar, Tolok Ukur: Jumlah Statistik Sektoral yang sudah meminta rekomendasi dari Pembina Data Statistik	1 Dokumen	1	1	468.058.800	1	718.476.000	2	1.186.534.800	BIDANG STATISTIK, PERSANDIAN DAN E-GOVERNMENT	-(Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan / Sub Kegiatan (output)	Kondisi Awal		Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					2023	2024	2025		2026		Kondisi Akhir			
					K	K	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Meningkatnya pengelolaan persandian dan keamanan informasi			Kinerja: Terwujudnya pengelolaan persandian dan keamanan informasi, Tolok Ukur: Indeks Keamanan Informasi (IKAMI)	2 Level	2	2	2.100.000.000	3	2.400.000.000	3	4.500.000.000		
		02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Kinerja: Meningkatnya perangkat daerah dalam menerapkan sertifikat elektronik (TTE), Tolok Ukur: Persentase perangkat daerah yang menerapkan sertifikat elektronik (TTE)	49,29 Persen	56,33	63,38	2.100.000.000	70,42	2.400.000.000	70,42	4.500.000.000		
		02.2.01.	Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kinerja: Tersedianya sistem elektronik yang menerapkan prinsip sistem manajemen keamanan informasi, Tolok Ukur: Jumlah sistem elektronik yang menerapkan prinsip sistem manajemen keamanan informasi	3 sistem elektronik	3	3	1.700.000.000	3	1.900.000.000	3	3.600.000.000		
		02.2.01.0001.	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kinerja: Ditetapkannya Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Tolok Ukur: Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	0 Peraturan	0	10	300.000.000	10	400.000.000	20	700.000.000	BIDANG STATISTIK, PERSANDIAN DAN E-GOVERNMENT	DISKOMINFO (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)
		02.2.01.0002.	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kinerja: Terlaksananya Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Tolok Ukur: Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	0 Laporan	0	10	400.000.000	10	500.000.000	20	900.000.000	BIDANG STATISTIK, PERSANDIAN DAN E-GOVERNMENT	DISKOMINFO (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)
		02.2.01.0003.	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Kinerja: Terlaksananya Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik, Tolok Ukur: Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	0 Laporan	0	1	500.000.000	1	500.000.000	2	1.000.000.000	BIDANG STATISTIK, PERSANDIAN DAN E-GOVERNMENT	DISKOMINFO (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)
		02.2.01.0004.	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kinerja: Tersedianya Layanan Keamanan Informasi untuk Perangkat Daerah di Tingkat Kabupaten/Kota, Tolok Ukur: Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	71 Perangkat Daerah	71	71	500.000.000	71	500.000.000	71	1.000.000.000	BIDANG STATISTIK, PERSANDIAN DAN E-GOVERNMENT	DISKOMINFO (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)
		02.2.02.	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Kinerja: Terselenggaranya titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik pada pemerintah daerah berdasarkan Pola Hubungan Komunikasi Sandi (PHKS) yang ditetapkan, Tolok Ukur: Jumlah titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik pada pemerintah daerah berdasarkan Pola Hubungan Komunikasi Sandi (PHKS) yang ditetapkan	4 perangkat daerah	4	4	400.000.000	5	500.000.000	5	900.000.000		
		02.2.02.0001.	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kinerja: Terlaksananya Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Tolok Ukur: Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	23 Perangkat Daerah	71	71	400.000.000	71	500.000.000	71	900.000.000	BIDANG STATISTIK, PERSANDIAN DAN E-GOVERNMENT	DISKOMINFO (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)
	Meningkatnya akuntabilitas tata kelola pemerintahan			Kinerja: Meningkatnya akuntabilitas tata kelola pemerintahan, Tolok Ukur: Nilai SAKIP	0 Nilai	68	68,5	12.559.000.000	69	15.705.000.000	137,5	28.264.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan / Sub Kegiatan (output)	Kondisi Awal		Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					2023	2024	2025		2026		Kondisi Akhir			
					K	K	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah			Kinerja: Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah, Tolok Ukur: Nilai LKIP	0 Nilai	70,7	70,75	12.559.000.000	70,8	15.705.000.000	70,8	28.264.000.000		
		01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kinerja: Meningkatnya kualitas layanan komunikasi dan informatika, statistik dan persandian, Tolok Ukur: Indeks Kepuasan Masyarakat Diskominfo	90,3 Poin	90,4	90,5	12.559.000.000	90,6	15.705.000.000	90,6	28.264.000.000		
		01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kinerja: Tersusunnya dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Tolok Ukur: Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang telah disusun	16 Dok	17	22	900.000.000	21	1.220.000.000	21	2.120.000.000		
		01.2.01.0001.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kinerja: Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Tolok Ukur: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	3	3	300.000.000	2	400.000.000	5	700.000.000	SEKRETARIAT DISKOMINFO	DISKOMINFO (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)
		01.2.01.0002.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kinerja: Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD, Tolok Ukur: Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	2	2	50.000.000	2	60.000.000	4	110.000.000	SEKRETARIAT DISKOMINFO	Diskominfo (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)
		01.2.01.0003.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kinerja: Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD, Tolok Ukur: Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	2	2	50.000.000	2	60.000.000	4	110.000.000	SEKRETARIAT DISKOMINFO	Diskominfo (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)
		01.2.01.0006.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kinerja: Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, Tolok Ukur: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	11 Laporan	11	11	300.000.000	11	400.000.000	22	700.000.000	SEKRETARIAT DISKOMINFO	Diskominfo (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)
		01.2.01.0007.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kinerja: Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Tolok Ukur: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4	4	200.000.000	4	300.000.000	8	500.000.000	SEKRETARIAT DISKOMINFO	Diskominfo (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)
		01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kinerja: Tersusunnya laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Tolok Ukur: Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	26 Dok	26	26	6.325.000.000	26	7.400.000.000	26	13.725.000.000		
		01.2.02.0001.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kinerja: Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN, Tolok Ukur: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 Orang/bulan	30	30	6.000.000.000	30	7.000.000.000	60	13.000.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Diskominfo (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan / Sub Kegiatan (output)	Kondisi Awal		Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					2023	2024	2025		2026		Kondisi Akhir			
					K	K	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		01.2.02.0005.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kinerja: Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, Tolok Ukur: Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1	1	75.000.000	1	100.000.000	2	175.000.000	SEKRETARIAT DISKOMINFO	Diskominfo (Kalurahan Sumber - Kecamatan sumber)
		01.2.02.0007.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kinerja: Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD, Tolok Ukur: Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	13 Laporan	13	13	250.000.000	13	300.000.000	26	550.000.000	SEKRETARIAT DISKOMINFO	Diskominfo (Kalurahan Sumber - Kecamatan sumber)
		01.2.05.	Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	Kinerja: Tersusunnya dokumen Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah, Tolok Ukur: Jumlah dokumen Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	1 Dok	1	1	150.000.000	1	200.000.000	1	350.000.000		
		01.2.05.0002.	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kinerja: Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan, Tolok Ukur: Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1	1	150.000.000	1	200.000.000	2	350.000.000	SEKRETARIAT DISKOMINFO	Diskominfo (Kalurahan Sumber - Kecamatan sumber)
		01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kinerja: Terpenuhi layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah, Tolok Ukur: Jumlah jenis layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	8 Layanan	8	8	1.605.000.000	8	2.430.000.000	8	4.035.000.000		
		01.2.06.0001.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kinerja: Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Tolok Ukur: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4	4	75.000.000	4	100.000.000	8	175.000.000	SEKRETARIAT DISKOMINFO	Diskominfo (Kalurahan Sumber - Kecamatan sumber)
		01.2.06.0002.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kinerja: Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Tolok Ukur: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	10	10	1.000.000.000	10	1.500.000.000	20	2.500.000.000	SEKRETARIAT DISKOMINFO	Diskominfo (Kalurahan Sumber - Kecamatan sumber)
		01.2.06.0003.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kinerja: Tersedianya Peralatan Rumah Tangga, Tolok Ukur: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	16 Paket	24	24	50.000.000	24	75.000.000	48	125.000.000	SEKRETARIAT DISKOMINFO	Diskominfo (Kalurahan Sumber - Kecamatan sumber)
		01.2.06.0005.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kinerja: Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan, Tolok Ukur: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12	12	50.000.000	12	80.000.000	24	130.000.000	SEKRETARIAT DISKOMINFO	Diskominfo (Kalurahan Sumber - Kecamatan sumber)
		01.2.06.0006.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kinerja: Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, Tolok Ukur: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12	12	50.000.000	12	75.000.000	24	125.000.000	SEKRETARIAT DISKOMINFO	Diskominfo (Kalurahan Sumber - Kecamatan sumber)
		01.2.06.0007.	Penyediaan Bahan/Material	Kinerja: Tersedianya Bahan/Material, Tolok Ukur: Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	12	12	100.000.000	12	150.000.000	24	250.000.000	SEKRETARIAT DISKOMINFO	Diskominfo (Kalurahan Sumber - Kecamatan sumber)

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan / Sub Kegiatan (output)	Kondisi Awal		Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					2023	2024	2025		2026		Kondisi Akhir			
					K	K	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		01.2.06.0008.	Facilitasi Kunjungan Tamu	Kinerja: Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu, Tolok Ukur: Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	12	12	30.000.000	12	50.000.000	24	80.000.000	SEKRETARIAT DISKOMINFO	Diskominfo (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)
		01.2.06.0009.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kinerja: Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, Tolok Ukur: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	80 Laporan	200	200	250.000.000	200	400.000.000	400	650.000.000	SEKRETARIAT DISKOMINFO	Diskominfo (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)
		01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kinerja: Terpenuhinya Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintah Daerah yang diadakan, Tolok Ukur: Jumlah jenis Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintah Daerah yang diadakan	2 Jenis	2	4	250.000.000	4	350.000.000	4	600.000.000		
		01.2.07.0005.	Pengadaan Mebel	Kinerja: Tersedianya Mebel, Tolok Ukur: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit	70	100	250.000.000	100	350.000.000	200	600.000.000	SEKRETARIAT DISKOMINFO	DISKOMINFO (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)
		01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kinerja: Terpenuhinya penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia, Tolok Ukur: Jumlah jenis penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia	6 Jenis	6	6	1.250.000.000	6	1.500.000.000	6	2.750.000.000		
		01.2.08.0002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kinerja: Tersedianya jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Tolok Ukur: Jumlah Laporan Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	36	36	750.000.000	36	900.000.000	72	1.650.000.000	SEKRETARIAT DISKOMINFO	-(Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)
		01.2.08.0004.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kinerja: Tersedianya jasa Pelayanan Umum Kantor, Tolok Ukur: Jumlah Laporan Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	24 Laporan	24	24	500.000.000	24	600.000.000	48	1.100.000.000	SEKRETARIAT DISKOMINFO	DISKOMINFO (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)
		01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kinerja: Terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara, Tolok Ukur: Jumlah jenis Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	5 Jenis	8	5	2.079.000.000	5	2.605.000.000	5	4.684.000.000		
		01.2.09.0002.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Penzinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kinerja: Tersedianya jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Penzinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Tolok Ukur: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Penzinnannya	1 Unit	1	1	4.000.000	1	5.000.000	2	9.000.000	SEKRETARIAT DISKOMINFO	DISKOMINFO (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)
		01.2.09.0006.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kinerja: Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, Tolok Ukur: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	33 Unit	30	50	75.000.000	50	100.000.000	100	175.000.000	SEKRETARIAT DISKOMINFO	DISKOMINFO (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)
		01.2.09.0009.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kinerja: Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, Tolok Ukur: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	3	3	2.000.000.000	3	2.500.000.000	6	4.500.000.000	SEKRETARIAT DISKOMINFO	DISKOMINFO (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)
TOTAL PENDANAAN								44.348.458.800		51.171.296.000		95.519.754.800		

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN

BIDANG URUSAN

Indikator kinerja dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025-2026 mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2026. Penjabaran dalam Renstra bertujuan untuk menguraikan langkah untuk mencapai tujuan dan sasaran RPD. Berikut ini tabel indikator kinerja Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025 – 2026:

Tabel 7.1 Indikator Kinerja Tujuan Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025-2026

NO	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPD	Target Capaian Setiap Tahun		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
			Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Nilai SAKIP	Nilai	68	68,5	69	69
2	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Poin	3,20	3,25	3,27	3,27

Tabel 7.2 Indikator Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025-2026

NO	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPD	Target Capaian Setiap Tahun		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
			Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Nilai LKIP	Nilai	70,70	70,75	70,80	72
2	Indeks Domain Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Poin	2,97	2,98	2,99	2,99
3	Indeks Domain Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Poin	3,00	3,05	3,10	3,10
4	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Poin	70	75	80	80
5	Tingkat ketersediaan data statistik sektoral	Persen	80	80	85	85
6	Indeks Keamanan Informasi (Indeks KAMI)	Level	II	II	III	III

Tabel 7.3 Indikator Kinerja Program Dinas Komunikasi dan Informatika
Tahun 2025-2026

NO	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (<i>Outcome</i>)	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPD	Target Capaian Setiap Tahun		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Poin	80	81	82	82
2	Program Aplikasi Informatika	Persentase perangkat daerah terfasilitasi jaringan TIK	Persen	100	100	100	100
		Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan administrasi pemerintahan dan layanan publik	Persen	58,33	58,33	66,67	66,67
3	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	Persen	100	100	100	100
4	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal	Persen	0	63,38	70,42	70,42
5	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Poin	90,40	90,50	90,60	90,60

Tabel 7.4 Indikator Kinerja Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika
Tahun 2025-2026

NO	Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Kegiatan (<i>Output</i>)	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPD	Target Capaian Setiap Tahun		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan kegiatan pengelolaan informasui dan komunikasi publik	laporan	12	12	12	12
2	Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah perangkat daerah yang terkoneksi jaringan internet yang disediakan	Perangkat daerah	71	71	71	71
3	Kegiatan Pengelolaan e-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah perangkat daerah yang menggunakan layanan infrastruktur SPBE	Perangkat daerah	71	71	71	71

NO	Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Kegiatan (<i>Output</i>)	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPD	Target Capaian Setiap Tahun		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
4	Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perangkat daerah yang memanfaatkan buku statistik daerah	Perangkat daerah	71	71	71	71
5	Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah kabupaten/Kota	Jumlah sistem elektronik yang menerapkan prinsip sistem manajemen keamanan informasi	Sistem elektronik	3	3	3	3
6	Kegiatan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perangkat daerah yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik pada pemerintah daerah berdasarkan Pola Hubungan Komunikasi Sandi (PHKS) yang ditetapkan	Perangkat daerah	4	4	5	5
17	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang telah disusun	Dokumen	17	22	21	21
8	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang telah disusun	Dokumen	26	26	26	26
9	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang telah disusun	Dokumen	1	1	1	1
10	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah jenis layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang telah disusun	Layanan	8	8	8	8
11	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah jenis Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintah Daerah yang diadakan	Jenis	2	4	4	4
12	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia	Jenis	6	6	6	6
13	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	Jenis	8	5	5	5

Disamping dijabarkan indikator diatas, Dinas Komunikasi dan Informatika berkewajiban memenuhi Indikator Kinerja Kunci (IKK) berdasarkan Permenpan RB Nomor 18 Tahun 2020 dan Indikator tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), sebagai berikut :

Tabel 7.5 Indikator Kinerja Kunci Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025-2026

No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Kinerja		Kondisi kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			Tahun 2024	2025	2026	
URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA						
IKK OUTCOME						
1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	persen	100	100	100	100
2	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	persen	58,33	58,33	66,67	66,67
3	Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	persen	80	81	82	82
IKK OUTPUT						
1	Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo	persen	100	100	100	100
2	Persentase perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo	persen	100	100	100	100
3	Tersedianya sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya)	Ada/ tidak	ada	ada	ada	ada
4	Persentase kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2015 tentang Registrasi Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara	persen	100	100	100	100
5	Persentase perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar	persen	100	100	100	100
6	Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundangundangan	persen	100	100	100	100
7	Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik	persen	33	33	33	33
8	Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik	persen	33	33	33	33
9	Persentase sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Sistem elektronik	3	3	3	3
10	Persentase layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah	persen	100	100	100	100
11	Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah	persen	100	100	100	100
12	Persentase perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah	persen	100	100	100	100
13	Persentase perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis data (sesuai renstra kominfo)	persen	100	100	100	100
14	Persentase data yang dapat berbagi pakai	persen	70	80	85	85
15	Persentase perangkat daerah yang Mengimplementasi inovasi yang mendukung <i>smart city</i>	persen	6	6	7	7
16	Persentase ASN pengelola TIK yang Tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo	persen	3	3	4	4
17	Tersedianya peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait implementasi <i>e-government</i>	Ada/ tidak	Ada	ada	ada	ada
18	Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah Kab/Kota yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah Kab/Kota	persen	56,25	56,25	62,50	62,50

No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Kinerja		Kondisi kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			Tahun 2024	2025	2026	
19	Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah Kab/Kota sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)	Persen	80	81	82	82
20	Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) dan SOP yang telah ditetapkan	Persen	80	81	82	82
URUSAN STATISTIK						
IKK OUTCOME						
1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	persen	100	100	100	100
2	Persentase perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	persen	100	100	100	100
IKK OUTPUT						
1	Tersedianya buku profil daerah	Ada/ tidak	ada	ada	ada	ada
2	Jumlah survey statistik sektoral yang dilakukan	Survei	0	0	0	0
3	Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan	Kompilasi	0	0	0	0
4	Jumlah survey statistik sektoral yang mendapat rekomendasi BPS	rekomendasi	0	0	0	0
5	Jumlah kompilasi statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dr BPS	rekomendasi	1	1	1	1
6	Persentase kelengkapan metadata kegiatan statistik sektoral	Persen	25	25	26	26
7	Persentase kelengkapan metadata indikator sektoral	Persen	25	25	26	26
URUSAN PERSANDIAN						
IKK OUTCOME						
1	Tingkat keamanan informasi pemerintah	Persen	9,68	9,68	12,90	12,90
IKK OUTPUT						
1	Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal dibanding banyaknya jumlah kegiatan strategis yang harus diamankan	Persen	9,68	9,68	12,90	12,90
2	Persentase sistem elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen yang telah menerapkan prinsip-prinsip manajemen keamanan informasi (SMKI) dan atau aplikasi persandian dibanding jumlah sistem elektronik yang ada pada pemerintah daerah	Persen	9,68	9,68	12,90	12,90
3	Persentase sistem elektronik/asset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah	Persen	9,68	9,68	12,90	12,90
4	Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik pada pemerin (PHKS) yang diterapkan pemerintah daerah berdasarkan pola hubungan komunikasi sandi	Persen	9,68	9,68	12,90	12,90

Tabel 7.6 Indikator Kinerja SDGs Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025-2026

No	Program/Kegiatan/Indikator Output	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Kinerja	
			Tahun 2024	2023	2024
I	Pada tahun 2030, meningkatkan secara signifikan jumlah pemuda dan orang dewasa yang memiliki keterampilan yang relevan, termasuk keterampilan teknik dan kejuruan, untuk pekerjaan, pekerjaan yang layak dan kewirausahaan.Global				
1	Proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).	Orang	50	50	75
II	Secara signifikan meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi, dan mengusahakan penyediaan akses universal dan terjangkau Internet di negara-negara kurang berkembang pada tahun 2020				
1	Proporsi penduduk yang terlayani mobile broadband.	Persentase	65	70	75
2	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam.	Persentase	65	70	75
III	Menjamin akses publik terhadap informasi dan melindungi kebebasan mendasar, sesuai dengan peraturan nasional dan kesepakatan internasional.				
1	Tersedianya Badan Publik yang menjalankan kewajiban sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Badan Publik	71	71	71
2	Persentase penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau adjudikasi non litigasi.	Persentase	100	100	100
3	Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.	PPID	71	71	71
4	Tingkat penetrasi akses tetap pitalebar (<i>fixed broadband</i>) di Perkotaan dan di Perdesaan	Persentase	65	70	75
5	Proporsi penduduk terlayani <i>mobile broadband</i> .	Persentase	65	70	75
IV	Pada tahun 2020, meningkatkan dukungan pengembangan kapasitas untuk negara berkembang, termasuk negara kurang berkembang dan negara berkembang pulau kecil, untuk meningkatkan secara signifikan ketersediaan data berkualitas tinggi, tepat waktu dan dapat dipercaya, yang terpilah berdasarkan pendapatan, gender, umur, ras, etnis, status migrasi, difabilitas, lokasi geografis dan karakteristik lainnya yang relevan dengan konteks nasional.				
1	Proporsi individu yang menggunakan internet	Persentase	65	70	75

Berikut penjelasan_cara perhitungan/ formulasi pada indikator tujuan dan indikator kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2025-2026

Tabel 7.7
Formulasi Indikator Tujuan Dinas Komunikasi dan Informatika

Tujuan PD	Indikator Tujuan	Formulasi	Target	
			2025	2026
Meningkatnya akuntabilitas tata kelola pemerintahan	Nilai SAKIP	Hasil Evaluasi Kemen PAN RB tentang SAKIP	Nilai 68,5	Nilai 69
Meningkatkan Kualitas Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks SPBE	Rata-rata nilai tertimbang dari tingkat kematangan setiap indikator SPBE Ket : Penilaian dari 3 indikator yang dikaji : 1. Kebijakan internal 2. Tata kelola SPBE 3. Manajemen SPBE 4. Layanan SPBE (Hasil evaluasi KEMENPAN RB Permenpan RB No 59 Tahun 2020)	3.25 poin	3.27 poin

Tabel 7.8
Formulasi Indikator Sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika

Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Sasaran	Formulasi	Target	
			2025	2026
Meningkatnya layanan penunjang urusan komunikasi dan informatika, urusan statistik dan urusan persandian	Nilai LKIP	Nilai LKIP = aspek perencanaan kinerja (30%) + aspek pengukuran kinerja (30%) + pelaporan kinerja (15%) + evaluasi akuntabilitas kinerja internal (25%) (Hasil Evaluasi Kemen PAN RB / Inspektorat Kabupaten Cirebon)	Nilai 70,75	Nilai 70,80
Meningkatnya Tata Kelola dan Layanan Sistem Pemerintahan berbasis elektronik	Indeks Domain Tata Kelola SPBE	Rata-rata nilai tertimbang dari tingkat kematangan domain tata kelola SPBE (Hasil evaluasi KEMENPAN RB)	2.98 poin	2.99 poin
	Indeks Domain Layanan SPBE	Rata-rata nilai tertimbang dari tingkat kematangan domain tata kelola SPBE (Hasil evaluasi KEMENPAN RB)	3.05 poin	3.10 poin
Meningkatnya keterbukaan informasi publik	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Rata-rata nilai tertimbang dari sub indikator keterbukaan informasi publik (Hasil evaluasi Komisi Informasi Pusat)	75 poin	80 poin
Meningkatnya keterbukaan informasi publik	Tingkat Ketersediaan Data Statistik Sektoral	Jumlah data sektoral yang telah dimutakhirkan/Jumlah total data sektoral yang harus disediakan x 100%	80 persen	85 persen
Meningkatnya pengelolaan persandian dan keamanan informasi	Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	Jumlah angka tertimbang dari tingkat kematangan setiap area keamanan informasi	2 level	3 level

Tabel 7.9
Formulasi Perhitungan Indikator Program Dinas Komunikasi dan Informatika

Program	Indikator Program	Formulasi	Target	
			2025	2026
Program Aplikasi Informatika	Persentase perangkat daerah terfasilitasi jaringan TIK	Jumlah perangkat daerah yang terfasilitasi jaringan TIK/ jumlah perangkat daerah Kabupaten Cirebon x 100%	100 persen	100 persen
	Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan administrasi pemerintahan dan layanan publik	Jumlah PD yang mengimplementasikan layanan administrasi pemerintahan dan layanan publik / jumlah Perangkat daerah Kabupaten Cirebon x 100%	58,33 persen	66,67 persen
Program Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah	Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah / Jumlah penduduk x 100%	81 persen	82 persen
Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	Jumlah Perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah / Jumlah Perangkat daerah Kabupaten Cirebon x 100%	100 persen	100 persen
Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal	Jumlah perangkat daerah yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal/ banyaknya jumlah perangkat daerah yang harus diamankan x 100%	63,38 persen	70,42 Persen
Program Penunjang Urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai IKM Diskominfo	Total dari nilai persepsi per unsur dibagi total unsur yang terisi dikali nilai penimbang	90,50 poin	90,60 poin

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon Tahun 2025 – 2026 merupakan kebijakan jangka menengah transisi yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025 – 2026 dan memperhatikan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra periode sebelumnya serta mandat yang diberikan berdasarkan kewenangan urusan pemerintahan.

Dokumen Renstra ini merupakan acuan rencana kerja tahunan agar dapat memberikan kontribusi maksimal terhadap pembangunan Jawa Barat, terutama pembangunan dalam bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian. melalui penetapan program unggulan dengan mengantisipasi ketersediaan anggaran.

Substansi Renstra dapat dilakukan penyesuaian seperlunya seiring perubahan lingkungan strategis di bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian keamanan informasi, baik dari internal maupun eksternal, yang mempengaruhi tujuan dan sasaran Renstra. Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon Tahun 2025 – 2026 ini diharapkan dapat menjadi pedoman atau panduan dalam pelaksanaan kebijakan penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sampai dengan Tahun 2026. Disamping itu juga perlu adanya komitmen yang kuat dalam menjamin kontinuitas dan konsistensi program pembangunan dengan menyesuaikan dinamika perubahan organisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan isu strategis terkini.

BUPATI CIREBON,

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

HILMY RIVA'I
BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2024 NOMOR

LAMPIRAN

1. Peraturan Bupati Cirebon tentang Tim Penyusunan Renstra Tahun 2025 – 2026
2. Peraturan Bupati Cirebon tentang Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025 -2026